



**DIKLAT PKN TINGKAT II
ANGKATAN XXXI THN.2024
PROYEK PERUBAHAN**



SIPERMATA

SIPERMATA

SOLUSI PERCEPATAN PEMBANGUNAN LOKPRI KP

**IR. MAKSI YAEN ERICH NENABU, M.T.
NOSIS. 20240707012335**

**LEMBAGA ADMINISTRASI
NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PUSAT PENDIDIKAN
ADMINISTRASI POLRI**



BANDUNG, 03 DESEMBER 2024

BERITA ACARA SEMINAR

BERITA ACARA SEMINAR IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN

Pada hari : Selasa
Tanggal : 03 Desember 2024
Pukul :
Tempat : Pusat Pendidikan Administrasi Polri

Telah diseminarkan Implementasi Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Tahun 2024 Angkatan XXXI

JUDUL : SIPERMATA, SOLUSI PERCEPATAN PEMBANGUNAN LOKPRI
KAWASAN PERBATASAN
DISUSUN OLEH : Ir. MAKSI YAEN ERICH NENABU, M.T.
JABATAN : KEPALA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
KELAS/KELOMPOK : TRI BRATA
NOMOR DAFTAR HADIR : 20240707012335

Coach

Dr. Burdan Ali Junjuran, S.H., M.Si

Penguji

Dr. Caca Syahroni, S.I.P., M. Si.

Peserta

Ir. Maksi Y. E. Nenabu, M.T.
Pembina Utama (IV/d)
NIP. 196803261997031005

Mentor



Kosmas D. Lana, S.H., M.Si.
Pembina Utama (IV/e)
NIP. 19650927 199011 1 004

Mengetahui:
Kepala Pusat Pendidikan Administrasi

Ruli Agus Pramono, S.I.K.
Komisaris Besar Polisi
NRP : 72080492

LEMBAR PERSETUJUAN RANCANGAN PROPER

FORM PERSETUJUAN MENTOR



FORM PERSETUJUAN MENTOR PKN TK. II ANGGATAN XXXI TAHUN 2024

Nama Peserta : Ir. Maksi Yaen Erich Nenabu, M.T
NDH : 20240707012335
Instansi : Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Nama Mentor : Kosmas D. Lana, S.H., M.Si.
NIP : 196509271990111004
Jabatan : Sekretaris Daerah
No. HP Mentor :

Gagasan : SIPERMATA, SOLUSI PERCEPATAN
Perubahan : PEMBANGUNAN LOKPRI

Kupang,

Disetujui oleh
Mentor,

Kosmas D. Lana, S.H., M.Si.

FORMULIR PERSETUJUAN COACH



FORMULIR PERSETUJUAN COACH PADA AGENDA AKTUALISASI KEPEMIMPINAN

1. Nama Peserta : Ir. Maksi Yaen Erich Nenabu, M.T
2. Instansi : Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
3. Gagasan : SIPERMATA, SOLUSI PERCEPATAN
Perubahan PEMBANGUNAN LOKPRI

Catatan terhadap Gagasan Perubahan yang disiapkan peserta

Rekomendasi :

.....
Disetujui oleh
Coach,

Dr. Burdan Ali Junjuran, S.H., M.Si.

KOMITMEN MELANJUTKAN PROYEK PERUBAHAN



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH

Jl. Bundaran PU Nomor 04, TDM – Kota Kupang

Pos-el: bppdprovinsi NTT@gmail.com

Laman: www.bppd.nttprov.go.id

KOMITMEN MELANJUTKAN PROYEK PERUBAHAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Ir. Maksi Yaen Erich Nenabu, M.T
NIP : 19680326 199703 1 005
Jabatan : Kepala Badan BPPD Provinsi NTT / Project Leader

Nama : Kosmas D. Lana, S.H, M.Si
NIP : 19650927 199011 1 004
Jabatan : Sekretaris Daerah / Mentor

Nama : Dr. Burdan Ali Junjuran, S.H, M.Si
NIP :
Jabatan : Widya Iswara / Coach

Berkomitmen untuk melanjutkan Proyek Perubahan dengan gagasan perubahan "SIPERMATA, SOLUSI PERCEPATAN PEMBANGUNAN LOKPRI"

.....,2024

Projec Leader

Ir. Maksi Y.E Nenabu, MT

Mentor

Kosmas D. Lana, S.H, M.Si

Coach

Dr. Burdan Ali Junjuran, S.H, M.Si

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur dan terima kasih patut dinaikan kepada Mu ya Allah Tuhan karena hanya atas Kasih dan anugerah serta pertolonganMu lah penulis dapat menyelesaikan Implementasi Rancangan Proyek Perubahan dan Laporan Implementasi Proyek Perubahan dengan judul: “SIPERMATA, SOLUSI PERCEPATAN PEMBANGUNAN LOKPRI KAWASAN PERBATASAN.

Laporan Proyek Perubahan ini diajukan sebagai syarat penilaian dalam rangka mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II (PKN II) yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan Kepemimpinan Kepolisian Republik Indonesia (PUSDIKMIN POLRI) Jawa Barat bersama Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI). Tahap Implementasi Proyek Perubahan ini sebagai Laboratorium Kepemimpinan bagi peserta untuk menerapkan dan menguji kapasitas kepemimpinannya setelah melewati tahapan pembelajaran sesuai agenda yang ditetapkan.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan dorongan yaitu kepada:

1. Bapak Dr. Andriko Noto Susanto, S.P, M.P, selaku Penjabat Gubernur NTT yang telah mendukung, memberikan bimbingan dan arahan.
2. Bapak Kosmas D. Lana, SH, M.Si, Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, selaku Mentor yang telah memberikan bimbingan dan arahan.
3. Bapak Burdan Ali Junjuran, SH, M.Si, selaku Coach yang telah memberikan bimbingan dan arahan.
4. Para Pengajar, Widyaiswara dan Teman-teman peserta PKN II Angkatan XXXI Tahun 2024 yang telah memberikan pengarahan dan pengetahuan kepada penulis selama mengikuti PKN II.
5. Istri dan anak-anak tercinta, atas dorongan dan semangatnya.
6. Keluarga besar Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Prov. NTT selaku Tim Efektif atas dukungan, kekompakan, dan kebersamaannya.

Kami berharap proyek perubahan ini dapat membawa perubahan organisasi BPPD Prov. NTT ke arah yang lebih baik dan terus berdampak bagi pembangunan daerah dan nasional. Sumbang saran dan kritik yang bersifat membangun untuk penyempurnaan proyek perubahan ini sangat kami harapkan.

Bandung, 03 Desember 2024

IR. Maksi Yaen Erich Nenabu, MT
NIP. 19680326 199703 1 005

DAFTAR ISI

COVER	
BERITA ACARA SEMINAR.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN.....	iii
FORM PERSETUJUAN MENTOR.....	iv
FORMULIR PERSETUJUAN COACH.....	v
KOMITMEN MELANJUTKAN PROYEK PERUBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
BAB I. RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN.....	1
1. JUDUL, VISI MISI.....	1
2. LATAR BELAKANG.....	2
3. ANALISA GAP.....	4
A. Kondisi Saat Ini.....	4
B. Kondisi Yang Diharapkan.....	4
C. Inovasi.....	5
4. TUJUAN DAN MANFAAT.....	5
A. Tujuan.....	5
B. Manfaat.....	6
5. OUTPUT DAN OUTCOME.....	5
A. Output.....	6
B. Outcome.....	7
6. TAHAPAN/MILESTONE RENCANA STRATEGIS.....	7
7. STAKEHOLDERS.....	8
A. Identifikasi Stakeholder.....	8

B. Pemetaan Stakeholder.....	9
C. Strategi Komunikasi dengan Stakeholders.....	10
8. AGILE TEAM.....	11
9. RENCANA STRATEGI MARKETING.....	11
10. STRATEGI PENGEMBANGAN KOMPETENSI.....	13
BAB II. PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN.....	14
1. CAPAIAN PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN.....	14
A. Capaian Milestone Rencana Strategis Jangka Pendek.....	14
B. Evidence Milestone Jangka Pendek.....	15
1. Pedoman Penyusunan Permata-Pergub.....	15
2. Sosialisasi Pergub Pedoman Penyusunan Permata.....	18
3. Rakor Permata APBD.....	21
2. IMPLEMENTASI STRATEGI MARKETING.....	25
3. IMPLEMENTASI STRATEGI PENGEMBANGAN KOMPETENSI.....	31
4. IMPLEMENTASI STRATEGI PENGEMBANGAN POTENSI DIRI.....	32
5. KONTRISBUSI PROPER.....	34
6. KOMITMEN KEBERLANJUTAN PROYEK PERUBAHAN	34
BAB III. PENUTUP.....	35
1. LESSON LEARNT.....	35
2. KESIMPUAN.....	35
3. SARAN / REKOMENDASI.....	36
DAFTAR PUSTAKA.....	37
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	38
LAMPIRAN.....	41

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Analisa Gap.....	5
Gambar 2. Pemetaan Stakeholder.....	10
Gambar 3. Strategi Komunikasi dengan Stakeholder.....	10
Gambar 4. Tata Kelola Proyek Perubahan.....	11
Gambar 5. Strategi Marketing.....	13
Gambar 6. SK Penugasan Tim Efektif.....	15
Gambar 7. Daftar Hadir Rapat Persiapan Tim Efektif.....	15
Gambar 8. Rapat Persiapan Tim Efektif.....	16
Gambar 9. Draft Pergub Pedoman Penyusunan Permata.....	16
Gambar 10. Asistensi Draft Pergub Permata ke Biro Hukum.....	17
Gambar 11. Pergub Pedoman Penyusunan Permata.....	17
Gambar 12. Konsultasi Pergub Permata ke Sekda dan Gubernur NTT.....	18
Gambar 13. Undangan Rapat Sosialisasi Permata.....	18
Gambar 14. Daftar Hadir Rapat Sosialisasi Permata.....	19
Gambar 15. Laporan Sosialisasi Permata.....	20
Gambar 16. Kegiatan Sosialisasi Permata.....	20
Gambar 17. BA Kesepahaman bersama.....	21
Gambar 18. Tanda Tangan B.A. kesepahaman bersama.....	21
Gambar 19. Rapat Persiapan Rakor Permata.....	22
Gambar 20. Daftar Hadir Rapat Persiapan Rakor Permata.....	22
Gambar 21. Undangan Rakor Permata.....	22
Gambar 22. Rekomendasi Rakor Permata.....	23
Gambar 23. Laporan Rakor Permata.....	24
Gambar 24. Kegiatan Rakor Permata.....	24
Gambar 25. Daftar Hadir Rakor Permata.....	25
Gambar 26. Kantor BPPD Prov. NTT.....	26
Gambar 26.a. Berita Koran Sosialisasi dan Rakor Permata	26
Gambar 27. Website BPPD Prov. NTT.....	27
Gambar 28. Media Sosial BPPD NTT.....	27
Gambar 29. Masyarakat perbatasan.....	28
Gambar 30. Perangkat Daerah Tematik Perbatasan.....	28
Gambar 31. Dukungan stakeholders perbatasan.....	30
Gambar 32. Mentoring Tim Efektif.....	32
Gambar 33. Pemetaan Sikap Perilaku Kepemimpinan.....	32
Gambar 34. Giat pembinaan Rohani.....	33
Gambar 35. Giat kerja bakti.....	33
Gambar 36. Giat seminar kepemimpinan.....	33

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Milestone rencana strategis jangka pendek.....	7
Tabel 2. Identifikasi Stakeholders.....	9
Tabel 3. Rencana strategi pengembangan kompetensi.....	13
Tabel 4. Capaian Milestone rencana strategis jangka pendek.....	14
Tabel 5. Rencana strategi pengembangan kompetensi.....	31
Tabel 6. Rencana strategi pengembangan potensi diri.....	33
Tabel 7. Komitmen Keberlanjutan Proyek Perubahan	34

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Analisis Masalah dengan Metode USG.....	41
Lampiran 2. Rekapitulasi Anggaran Pembangunan di KP NTT (APBD Provinsi)...	41
Lampiran 3. Intervensi Pembangunan di KP NTT (APBD Provinsi).....	42
Lampiran 4. Rekapitulasi Anggaran Pembangunan di KP NTT (APBN).....	42
Lampiran 5. Intervensi Pembangunan di KP NTT (APBN).....	43
Lampiran 6. Analisis Kebijakan Startegis dengan Metode USG.....	44
Lampiran 7. Analisis Kebijakan Strategis Dengan Metode SWOT.....	45
Lampiran 8. Rekapitulasi Usulan Anggaran Program/Kegiatan T.A. 2026 APBDP pada Kawasan Perbatasan.....	47
Lampiran 9. Arti Lambang “SIPERMATA”.....	48
Lampiran 10. Evidence Implementasi SIPERMATA.....	48

ABSTRAK

Proyek Perubahan ini diberi judul “**SIPERMATA, Solusi Percepatan Pembangunan Lokpri KP**”. SIPERMATA atau Sistim Perencanaan Tematik Perbatasan adalah mekanisme tata kelola perencanaan pembangunan dengan tema khusus perbatasan di Lokasi Prioritas Kawasan Perbatasan / Lokpri KP dengan menggunakan sumber dana APBD Provinsi dalam rangka Intervensi Pembangunan di Lokpri KP.

Latar belakang diangkatnya Proyek Perubahan dengan judul “**SIPERMATA, Solusi Percepatan Pembangunan Lokpri KP**” adalah:

1. Kawasan Perbatasan Negara (KPN) menjadi pusat perhatian pembangunan pemerintah sesuai nawa cita ke 3 Presiden Jokowi yaitu Membangun Indonesia dari pinggiran.
2. Menteri Dalam Negeri RI meminta agar Pemerintah Provinsi peduli anggarakan pengelolaan perbatasan di APBDnya.
3. Nusa Tenggara Timur adalah salah satu provinsi Kawasan Perbatasan Negara (KPN) sekaligus sebagai provinsi kepulauan di Indonesia.
4. Intervensi Pembangunan Lokpri Kawasan Perbatasan dengan sumber dana APBD kecil dan cenderung menurun.
5. Rata-rata total intervensi pembangunan Kawasan Perbatasan oleh APBN 3 Tahun terakhir cukup besar.

Proyek Perubahan ini merupakan inovasi baru tentang suatu strategi kebijakan sistim perencanaan dan pengelolaan Kawasan Perbatasan (KP) di NTT terhadap Isu “**Lambatnya Pertumbuhan Ekonomi di Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi NTT**”. Penyebab dari isu tersebut adalah “**Belum Adanya Perencanaan Pembangunan APBD Terpadu di Lokpri KP**” sebagai Isu Strategis. Dampak dari isu strategis tersebut adalah timbulnya kondisi saat ini yaitu **Rendahnya Intervensi Pembangunan di LOKPRI KP (Lokasi Prioritas Kawasan Perbatasan) dengan Sumber Dana APBD**.

Strategi kebijakan sebagai solusi inovatif dari Proyek Perubahan ini adalah dengan menghadirkan **SIPERMATA** yaitu **Sistim Perencanaan Tematik Perbatasan** untuk peningkatan pembangunan Lokpri Kawasan Perbatasan dengan sumber dana APBD yang selanjutnya berdampak pada percepatan pertumbuhan ekonomi di Lokpri Kawasan Perbatasan.

Tujuan Proyek Perubahan SIPERMATA, Solusi Percepatan Pembangunan Lokpri KP adalah mewujudkan sistim perencanaan program APBD Lokpri KP yg menyeluruh dan sesuai skala prioritas. Tujuan jangka pendek:

- Membuat Pedoman PERMATA Lokpri Kawasan Perbatasan
- Melakukan sosialisasi Pedoman PERMATA untuk bangun kesepahaman bersama lintas OPD
- Melakukan Rakor Permata APBD Lokpri KP tahun ke n+2
Manfaat dari Proyek Perubahan SIPERMATA Lokpri KP yaitu:
 1. Meningkatkan intervensi program pembangunan lintas OPD
 2. Menghasilkan program pembangunan lintas OPD sesuai skala prioritas
 3. Meningkatkan koordinasi antar OPD dalam program Pembangunan
 4. Anggaran Pembangunan OPD Provinsi dapat meningkat

Adapun Output dari Proyek Perubahan ini terdiri dari jangka pendek, jangka menengah dan jangka Panjang dengan rincian:

Jangka pendek adalah:

1. Pedoman PERMATA Lokpri Kawasan Perbatasan (SK SEKDA)
2. Laporan sosialisasi Pedoman PERMATA
3. Berita Acara kesepahaman bersama lintas OPD tentang PERMATA
4. Rekomendasi Rakor Permata APBD Lokpri KP tahun ke n+2
5. Laporan Rakor Permata APBD

Jangka menengah adalah:

1. BA Rekonsiliasi Permata APBD Lokpri KP tahun ke n+2
2. SK Sekda/Ketua TAPD tentang Permata APBD Lokpri KP tahun ke n+2
3. Juknis SIPERMATA Lokpri KP

Jangka Panjang adalah:

1. Laporan Monev implementasi Permata APBD Lokpri KP tahun ke n+2

Outcome dari proyek perubahan ini adalah:

1. Intervensi pembangunan sumber dana apbd di lokpri kawasan perbatasan makin meningkat dan terarah sesuai skala prioritas
2. Adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi di lokpri kawasan perbatasan
3. Terwujudnya masyarakat di lokpri kawasan perbatasan yang mandiri dan sejahtera.

BAB I

RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN

1. JUDUL, VISI MISI

Rancangan Proyek Perubahan ini diberi judul “**SIPERMATA, Solusi Percepatan Pembangunan Lokpri KP**”. SIPERMATA atau Sistem Perencanaan Tematik Perbatasan adalah mekanisme tata Kelola perencanaan pembangunan di Lokasi Prioritas Kawasan Perbatasan / Lokpri KP dengan menggunakan sumber dana APBD Provinsi. Rancangan Proyek Perubahan PKN Tingkat II diarahkan untuk memenuhi kompetensi manajerial sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan ASN.

Untuk mencapai hasil yang optimal, pembangunan kawasan perbatasan sering memerlukan pendekatan terpadu yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah, sektor swasta, masyarakat lokal, dan organisasi non-pemerintah. Koordinasi yang baik dan perencanaan yang matang akan membantu mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada di kawasan perbatasan. Gagasan inovasi SIPERMATA sebagai sebuah sistem perencanaan pembangunan perbatasan menjadi solusi untuk percepatan pelaksanaan pembangunan Lokasi Prioritas Kawasan Perbatasan.

Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dibentuk pada tahun 2010, sebagai Badan yang mengoordinasi dan mendukung pembangunan pada Kawasan Perbatasan Negara khususnya perbatasan darat dan laut RI-RDTL dan perbatasan laut RI-Australia. BPPD Provinsi NTT menjalankan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2023 berkolaborasi bersama OPD lain untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah.

Visi dan Misi Pemerintah Daerah serta tugas dan fungsi BPPD Provinsi NTT adalah sebagai berikut:

1. Visi

“Nusa Tenggara Timur mandiri, maju dan berkelanjutan guna mewujudkan Indonesia emas 2045”.

2. Misi

Misi Pemerintah Provinsi yang langsung berkaitan dengan tugas fungsi BPPD Provinsi NTT adalah:

Ke 5. Mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berketahanan sosial budaya dan ekologi.

Ke 6. Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan.

Ke 7. Mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan.

Ke 8. Mewujudkan kesinambungan pembangunan daerah.

Tugas dan fungsi BPPD Prov. NTT sesuai Peraturan Gubernur NTT Nomor 101 Tahun 2023 yaitu:

Tugas:

1. Menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan
3. Melaksanakan evaluasi dan pengawasan pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan

Tugas BPPD yang berkaitan dan masuk dalam area perubahan adalah tugas 1 (satu) yaitu Menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan.

Fungsi:

1. Penyusunan rencana aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan
2. Penyusunan program dan anggaran Pembangunan Kawasan Perbatasan sesuai skala prioritas
3. Pengoordinasian pelaksanaan Pembangunan dan pemanfaatan Kawasan Perbatasan

Fungsi BPPD yang berkaitan dan masuk dalam area perubahan adalah fungsi 1 (satu) yaitu Penyusunan rencana aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan dan fungsi 2 yaitu Penyusunan program dan anggaran Pembangunan Kawasan Perbatasan sesuai skala prioritas.

2. LATAR BELAKANG

Latar belakang diangkatnya Proyek Perubahan dengan judul **“SIPERMATA, Solusi Percepatan Pembangunan Lokpri KP”** adalah:

1. Kawasan Perbatasan Negara (KPN) menjadi pusat perhatian pembangunan pemerintah sesuai nawa cita ke 3 Presiden Jokowi yaitu Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) dan perbatasan dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah pusat telah menyisihkan anggaran yang berkali-kali lipat untuk mewujudkan Nawacita nomor 3 tersebut. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota diharapkan ikut menaruh perhatian dalam pembangunan kawasan perbatasan bersama Pemerintah Pusat agar terjadi percepatan pembangunan untuk mengatasi ketimpangan antara daerah pusat dan daerah pinggiran, dengan fokus pada pembangunan

dan pemberdayaan di tingkat lokal, khususnya di desa-desa dan daerah terpencil.

2. Menteri Dalam Negeri RI meminta agar Pemerintah Provinsi peduli anggarkan pengelolaan perbatasan di APBDnya. Menurut Mendagri yang mengalokasikan dana APBDnya untuk mengembangkan perbatasannya hanya 7 provinsi, yang 11 provinsi mungkin belum mendapatkan informasi yang cukup sehingga waktu buat perencanaan tidak memasukan pengelolaan kawasan perbatasan. Dengan pernyataan Mendagri dan nawa cita ke 3 inilah yang menjadikan pengelolaan Kawasan perbatasan menjadi isu penting. Ini merupakan langkah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia, tidak hanya di kota-kota besar tetapi juga di daerah-daerah pinggiran dan perbatasan.
3. Nusa Tenggara Timur adalah salah satu provinsi Kawasan Perbatasan Negara (KPN) sekaligus sebagai provinsi kepulauan di Indonesia yang terletak di bagian timur Indonesia dengan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Laut Flores, sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia dan Negara Australia, sebelah timur berbatasan dengan Negara Republik Demokratik Timor Leste, sebelah Barat berbatasan dengan Selat Sape Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan luas wilayah sekitar 46 446,64 dan luas perairan kurang lebih 200.000 km² di luar perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Provinsi ini memiliki 1.192 pulau, sebanyak 342 pulau sudah mempunyai nama dan sisanya 946 pulau belum mempunyai nama. Tingkat kemiskinan di Provinsi NTT 19,48% atau 1,13 juta orang pada Maret 2024, tingkat kemiskinan ekstrem pada tahun 2023 mencapai 3,93% atau 227,9 ribu orang. ISU **“Lambatnya Pertumbuhan Ekonomi di Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi NTT”** sudah bukan hal baru lagi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor / masalah yaitu:
 - a. Belum adanya perencanaan pembangunan APBD terpadu di Lokpri KP
 - b. Minimnya sumber daya alam dan infrastruktur
 - c. Masih rendahnya intervensi APBN

Setelah didiagnosis menggunakan metode USG (lampiran 1) ditemukan masalah yang cukup serius berkaitan dengan tugas fungsi BPPD sebagai ISU Strategis **“Belum adanya perencanaan pembangunan APBD terpadu di Lokpri KP”**. Hal ini berdampak pada kondisi organisasi saat ini yaitu fungsi Penyusunan rencana aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan serta Penyusunan program dan anggaran Pembangunan Kawasan Perbatasan sesuai skala prioritas belum berjalan dengan baik.

4. Intervensi Pembangunan Lokpri Kawasan Perbatasan dengan sumber dana APBD kecil dan cenderung menurun yaitu 0,44% menjadi 0,23%. Rata-rata 3 tahun terakhir 0,37% (lampiran 2). Sistem perencanaan program Pembangunan berjalan sesuai mekanisme yang ada yaitu musrenbangprov secara menyeluruh yang dikoordinir oleh Bappelibangda yang sekarang berganti nama menjadi Bapperida. Tidak ada tahapan perencanaan program yang diarahkan khusus / focus untuk membahas kebutuhan program di Kawasan Perbatasan. Hal ini yang menyebabkan Intervensi Pembangunan Lokpri Kawasan Perbatasan dengan sumber dana APBD cenderung menurun bahkan bisa terjadi tidak ada alokasi anggaran untuk pengelolaan perbatasan.
5. Rata-rata total intervensi pembangunan Kawasan Perbatasan oleh APBN 3 Tahun terakhir cukup besar yaitu 2,34% (lampiran 2). Pemerintah pusat tetap konsisten untuk mengalokasikan anggaran pengelolaan Kawasan Perbatasan yang besar seturut dengan nawacita ke 3. Hal ini dapat menjadi rujukan bagi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota untuk memberikan perhatian yang besar bagi pengelolaan Kawasan perbatasan dengan meningkatkan alokasi anggarannya.
6. Sebagai perbandingan di India (Asia) Rata-rata alokasi Program Pembangunan Kawasan Perbatasan yaitu 7,50% (*Jurnal Delhi Policy Group / DGP, oleh Brig. Arun Sahgal, Purn. Ph.D), (lampiran 3). Angka presentase alokasi anggaran untuk pengelolaan Kawasan perbatasan 2,00-2,30% dari APBD cukup ideal dan dapat menjadi rujukan bagi pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.

3. ANALISA GAP

A. Kondisi Saat Ini

ISU Strategis berkaitan dengan tugas fungsi BPPD yaitu **“Belum adanya perencanaan pembangunan APBD terpadu di Lokpri KP”**. Hal ini memberi dampak pada Kondisi saat ini yaitu:

- a. Rendahnya Intervensi perencanaan tematik perbatasan APBD di Lokasi Prioritas Kawasan Perbatasan
- b. Program Pembangunan di Lokasi Prioritas Kawasan Perbatasan belum sesuai skala prioritas
- c. Lemahnya Koordinasi Antar OPD dalam pembangunan di Lokasi Prioritas Kawasan Perbatasan
- d. Kecilnya anggaran di OPD Provinsi

B. Kondisi Yang Diharapkan

- a. Meningkatnya Intervensi perencanaan tematik perbatasan APBD di Lokasi Prioritas Kawasan Perbatasan

- b. Program Pembangunan di Lokasi Prioritas Kawasan Perbatasan sesuai skala prioritas
- c. Meningkatkan Koordinasi antar OPD dalam Pembangunan di Lokasi Prioritas Kawasan Perbatasan
- d. Mendorong Penambahan anggaran di OPD Provinsi.

C. Inovasi

Dibutuhkan suatu jembatan strategi kebijakan atau disebut inovasi untuk mencapai kondisi yang diharapkan sebagai perubahan dari kondisi semula untuk menjawab isu strategis **“Belum adanya perencanaan pembangunan APBD terpadu di Lokpri KP”**. Beberapa alternatif Jembatan strategi kebijakan atau inovasi yang dapat diidentifikasi sbb:

- a. Membuat SIPERMATA Lokpri KP
- b. Loby Pemerintah Pusat menaikkan anggaran DAK dan Dekonsentrasi
- c. Menambahkan fungsi perencanaan perbatasan ke Bapperida.

Hasil diagnosis menggunakan metode USG (lampiran 4) menetapkan bahwa **strategi kebijakan / inovasi** yang paling tepat adalah **“Membuat SIPERMATA Lokpri KP”** untuk mempercepat Pembangunan Lokasi Prioritas Kawasan Perbatasan dengan sumber dana APBD yang berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan dan selanjutnya dapat terwujud Masyarakat mandiri dan Sejahtera.

Gambar 1. Analisa Gap

4. TUJUAN DAN MANFAAT

A. Tujuan

Tujuan dari proyek perubahan dengan judul SIPERMATA, Solusi percepatan pembangunan Lokpri KP adalah Mewujudkan sistim

perencanaan program Lokpri KP dengan sumber dana APBD yg menyeluruh dan sesuai skala prioritas. Tujuan Jangka Pendek, Jangka Menengah dan Jangka Panjang sbb:

a. Jangka Pendek 2 bulan:

1. Membuat Pedoman PERMATA Lokpri KP
2. Melakukan sosialisasi Pedoman PERMATA untuk bangun kesepahaman bersama lintas OPD
3. Melakukan Rakor Permata Lokpri KP APBD tahun ke n+2

b. Jangka Menengah 6 Bulan:

1. Rekonsiliasi Permata Lokpri KP APBD tahun ke n+2
2. Membuat SK Sekda/Ketua TAPD tentang Permata Lokpri KP APBD tahun ke n+2
3. Membuat Juknis PERMATA Lokpri KP

c. Jangka Panjang 1 Tahun:

1. Monitoring evaluasi implementasi Permata Lokpri KP APBD tahun ke n+2

B. Manfaat

Manfaat dari proyek perubahan dengan judul SIPERMATA, Solusi percepatan pembangunan Lokpri KP adalah:

- a. Meningkatkan intervensi program pembangunan lintas OPD di Lokpri Kawasan Perbatasan
- b. Menghasilkan program pembangunan lintas OPD sesuai skala prioritas
- c. Meningkatkan koordinasi antar OPD dlm Pembangunan Lokpri KP
- d. Anggaran di OPD Provinsi untuk Lokpri KP dapat meningkat

5. OUTPUT DAN OUTCOME

A. Output

Adapun Output dari proyek perubahan ini secara keseluruhan baik jangka Pendek, Jangka Menengah dan Jangka Panjang adalah:

Jangka pendek:

1. Pedoman PERMATA Lokpri Kawasan Perbatasan (SK Sekda)
2. Laporan sosialisasi Pedoman PERMATA
3. Berita Acara kesepahaman bersama lintas OPD tentang PERMATA
4. Rekomendasi Rakor Permata Lokpri KP APBD tahun ke n+2
5. Laporan Rakor Permata Lokpri KP APBD

Jangka menengah:

1. BA Rekonsiliasi Permata Lokpri KP APBD tahun ke n+2
2. SK Sekda/Ketua TAPD tentang Permata Lokpri KP APBD tahun ke n+2
3. Juknis PERMATA Lokpri KP

Jangka Panjang:

1. Laporan Monev implementasi Permata Lokpri KP APBD tahun ke n+2

B. Outcome

Outcome dari proyek perubahan ini adalah:

1. Intervensi pembangunan sumber dana apbd di lokpri kawasan perbatasan makin meningkat dan terarah sesuai skala prioritas
2. Adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi di lokpri kawasan perbatasan
3. Terwujudnya masyarakat di lokpri kawasan perbatasan yang mandiri dan Sejahtera

6. TAHAPAN / MILESTONE RENCANA STRATEGIS

Berikut adalah Tahapan Perubahan atau Milestone rencana strategis jangka pendek (60 hari).

No	Uraian Kegiatan	Penangg Jwb	Waktu Pelaksanaan								Output Tahapan	
			Sep	Oktober				November				
Tahapan Jangka Pendek			IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
1.	Pedoman PERMATA Lokpri KP	Project Leader										Pdm Permata, SK Sekda
a.	Membuat SK Tim Efektif											SK Tim Efektif
b.	Rapat Persiapan											Daftar hadir
c.	Buat Draf Pedoman PERMATA, SK Sekda											Draf Permata, SK Sekda
d.	Persetujuan Sekda ttg Pedoman Permata											SK Sekda ttg Permata
2.	Sosialisasi Pedoman PERMATA	Project Leader										Tersosialisasi
a.	Membuat, distribusi undangan											Undangan
b.	Rapat Sosialisasi PERMATA											Lap Sosialisasi
c.	Tdd BA Kesepahaman bersama											BA Kesepahaman
3.	Rakor Permata APBD	Project Leader										Terlaksana Rakor
a.	Rapat persiapan Tim Efektif											Daftar hadir
b.	Membuat, distribusi undangan											Undangan
c.	Rakor Permata											Rekomendasi, Laporan Rakor

Tabel 1. Milestone rencana strategis jangka pendek

Milestone Rencana Strategis memuat kegiatan dan tahapan kegiatan yang terukur serta output tahapan yang terukur dan dapat dicapai sebagai bukti pelaksanaan aksi perubahan (evidence).

7. STAKEHOLDERS

Dalam peningkatan percepatan Pembangunan pada Kawasan perbatasan, sangat dibutuhkan proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memetakan pihak-pihak yang memiliki kepentingan atau berpengaruh terhadap suatu perubahan, kebijakan, atau organisasi.

A. Identifikasi Stakeholders

Langkah awal untuk memastikan keberhasilan implementasi proyek perubahan adalah melakukan Identifikasi Stakeholders. Perlu dibedakan Stakeholders internal dan Stakeholders external dan bagaimana hubungan keterkaitannya dalam implementasi proyek perubahan tersebut. Stakeholders internal dibedakan atas vertical ke atas, horizontal dan vertical ke bawah sedangkan stakeholders external dibedakan atas primer dan sekunder. Identifikasi stakeholders yang tepat akan menghasilkan pemetaan stakeholders yang tepat dan pada akhirnya akan memudahkan dalam membangun komunikasi dengan memilih strategi komunikasi yang tepat pula.

No.	Nama SH	SH Internal			SH External		Deskripsi
		Vertikal keatas	Horisontal	Vertikal kebawah	Primer	Sekunder	
1.	Gubernur	v					Penentu kebijakan anggaran
2.	Sekda	v					Penentu kebijakan anggaran
3.	Asisten II	v					Penentu kebijakan program
4.	Ka Baperida		v				Penentu kebijakan program
5.	Anggota TAPD		v				Penentu kebijakan program
6.	Komisi I DPRD				v		Penentu kebijakan anggaran
7.	KA BPPD Kab. Perbatasan				v		Pengusul program

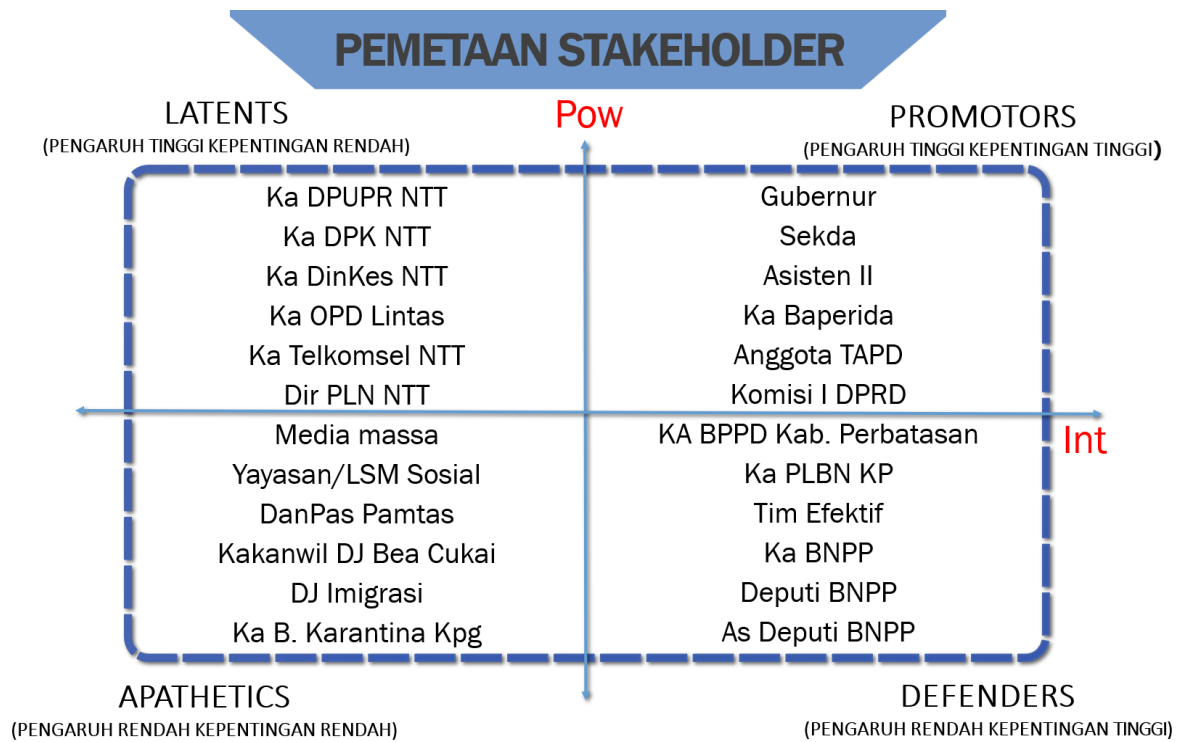
8	Media massa					v	Membantu sosialisasi
9.	Ka DPUPR NTT		v				Pengusul program
10.	Ka DPK NTT		v				Pengusul program
11.	Ka DinKes NTT		v				Pengusul program
12.	Ka OPD Lintas		v				Pengusul program
13.	Ka PLBN KP					v	Dipengaruhi langsung
14.	Ka Telkomsel NTT					v	Dipengaruhi langsung
15	Dir PLN NTT					v	Dipengaruhi langsung
16	Yayasan/LSM Sosial					v	Dipengaruhi tdk langsung
17	Tim Efektif			v			Membantu teknis proper
18	DanPas Pamtas					v	Dipengaruhi tdk langsung
19	Kakanwil DJ Bea Cukai					v	Dipengaruhi tdk langsung
20	DJ Imigrasi					v	Dipengaruhi tdk langsung
21	Ka B. Karantina Kpg					v	Dipengaruhi tdk langsung
22	Ka BNPP					v	Dipengaruhi langsung
23	Deputi BNPP					v	Dipengaruhi langsung
24	As Deputi BNPP					v	Dipengaruhi langsung

Tabel 2. Identifikasi Stakeholders

B. Pemetaan Stakeholders

Pemetaan Stakeholders dikelompokkan dalam 4 kelompok menurut tingkat kepentingan/ perhatian (interest) dan tingkat pengaruh/ kekuasaan (influence/ power). Promotors adalah Stakeholders yang memiliki tingkat pengaruh atau power yang tinggi dan tingkat kepentingan tinggi. Latens adalah Stakeholders yang memiliki tingkat pengaruh atau power yang tinggi namun tingkat kepentingan akan adanya proyek perubahan ini rendah. Deffenders adalah Stakeholders yang memiliki tingkat pengaruh atau power yang rendah namun tingkat kepentingan tinggi. Apathetics adalah Stakeholders yang memiliki tingkat pengaruh atau power yang rendah dan tingkat kepentingan rendah.

Hasil pemetaan Stakeholders dalam kelompok Promotors, Latents, Deffenders dan Apathetics seperti dalam gambar.



Gambar 2. Pemetaan Stakeholder

C. Strategi Komunikasi dengan Stakeholders

Strategi Komunikasi dengan Stakeholder tipe Promoters, Latens, Deffender dan Apathetics berbeda-beda. Gambar berikut memperlihatkan strategi komunikasi yang digunakan kepada masing-masing Stakeholder untuk mencapai keberhasilan implementasi proyek perubahan.

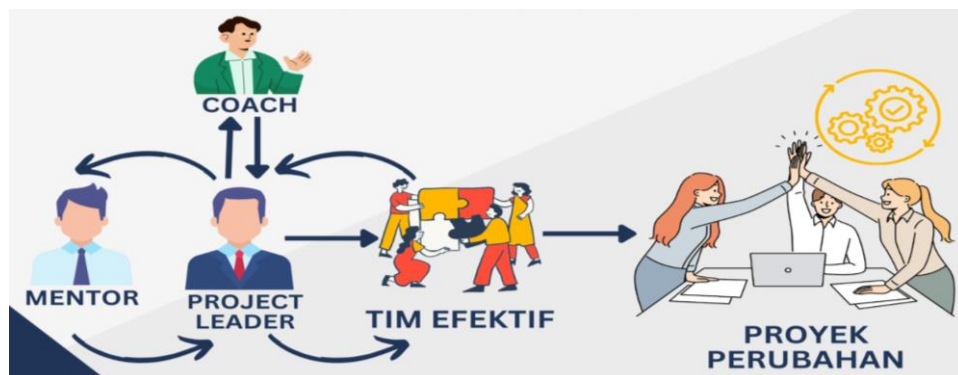


Gambar 3. Strategi Komunikasi dengan Stakeholder

8. AGILE TEAM

Perancangan dan Implementasi proyek perubahan ini didukung dengan Agile Team atau Tim Efektif yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Badan Pengelola Perbatasan Provinsi NTT Nomor: BPPD.188.68/31/VIII/2024, tanggal 05 Agustus 2024. Agile Team terdiri dari sekretaris dijabat sekretaris badan, koordinator data perencanaan dijabat kepala bidang perencanaan dan fasilitasi kerjasama, koordinator data pelaksanaan dijabat kepala bidang koordinasi pelaksanaan, koordinator data monitoring dan evaluasi dijabat kepala bidang monitoring evaluasi dan anggota terdiri dari staf pada sekretariat, bidang perencanaan dan fasilitasi kerjasama, bidang koordinasi pelaksanaan dan bidang koordinasi pelaksanaan.

Dalam pelaksanaannya, agile team berkolaborasi dengan pemimpin proyek perubahan / project leader yaitu Kepala Badan Pengelola Perbatasan Provinsi NTT, Mentor dan Coach. Hubungan Project Leader dan Tim Efektif adalah garis komando dan koordinasi, Project Leader dan Mentor adalah garis konsultatif dan koordinasi, Project Leader dan Coach adalah garis konsultatif dan koordinasi. Tata Kelola proyek perubahan seperti terlihat pada gambar.



Gambar 4. Tata Kelola Proyek Perubahan

9. RENCANA STRATEGI MARKETING

Perkembangan teknologi dan perkembangan sosial mendorong tuntutan yang lebih kuat kepada instansi pemerintah untuk dapat memberikan layanan dan memiliki kinerja yang lebih baik. Sementara itu berbagai indikator kinerja pemerintah masih belum memuaskan baik indeks kepuasan masyarakat, indeks kemudahan berusaha, standar pelayanan minimal, dan sebagainya masih membutuhkan perbaikan yang serius. Penerapkan strategi marketing dengan pendekatan mix 4P1C secara tepat dapat meningkatkan kinerja dan kualitas layanan pemerintah bagi masyarakat. Pendekatan strategi marketing mix 4P1C diawali atau dilengkapi

dengan pendekatan fokus kepada *customer*. Khusus unsur *price* perlu mendapat perhatian tersendiri karena karakteristik yang khas di sektor publik. Price tidak dapat hanya dimaknai sebagai uang, namun segala pengorbanan atau ongkos untuk mendapat *produk* harus dimaknai sebagai price. Selain itu dimensi *place* (distribusi) terkait dimana, kapan, dan bagaimana produk dapat diakses karena berpengaruh terhadap aksesibilitas, maka juga sangat berkaitan dengan pengertian price tersebut. Semakin mudah suatu produk untuk diakses maka maknanya adalah semakin rendah price dari produk tersebut. Harga yang rendah ini merupakan prinsip yang harus dicapai dalam marketing. Kemudahan mendapatkan produk sangat ditentukan oleh seberapa gencar *promosi* yang dilakukan sebagai salah satu dimensi yg tidak terpisahkan.

Adapun strategi marketing dalam melaksanakan proyek perubahan ini untuk mendukung pembangunan pada Lokpri Kawasan perbatasan adalah 4P1C sbb:

1. Product : SIPERMATA LOKPRI KP
Jangka Pendek 60 Hari tdd:
Permata (SK Sekda), Laporan Sosialisasi Permata, B.A Kesepahaman bersama, Rekomendasi Rakor, Laporan Rakor Permata.
Jangka menengah 6 bulan tdd:
B.A. Rekonsiliasi, SK Sekda/Ketua TAPD, Juknis Permata.
Jangka Panjang 1 tahun tdd:
Laporan Monev pelaksanaan Permata.
Yang akan dihasilkan dalam implementasi proyek perubahan adalah produk jangka pendek dalam 60 hari.
2. Place : BPPD NTT
3. Promotion : Sosialisasi, rakor, website, media sosial
4. Price : Free, intervensi Permata APBD meningkat
5. Costumer : Masyarakat Lokpri kawasan perbatasan, Perangkat Daerah Tematik Perbatasan.

STRATEGI MARKETING



Gambar 5. Strategi Marketing

10. STRATEGI PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Rencana strategi pengembangan kompetensi dalam proyek perubahan penting untuk memastikan bahwa tim efektif atau stakeholders terdampak proyek perubahan memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mencapai tujuan proyek.

No	Pihak Terdampak	Perubahan Kompetensi yang Dibutuhkan	Cara Pengembangan Kompetensi
1	Sekretaris BPPD	Perencanaan program	e-Learning / mentoring
2	Analisis perencana	Perencanaan program	e-Learning / mentoring
3	Kabid perencanaan	Perencanaan program	e-Learning / mentoring
4	Pranata komputer	Perencanaan program	e-Learning / mentoring

Tabel 3. Rencana strategi pengembangan kompetensi

BAB II PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN

1. CAPAIAN PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN

A. Capaian Milestone rencana strategis jangka pendek

Pelaksanaan proyek perubahan didasarkan pada tahapan perubahan / milestone rencana strategis jangka pendek yang telah diseminarkan dan disetujui dalam rancangan proyek perubahan. Milestone rencana strategis jangka pendek terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yaitu Pedoman PERMATA Lokpri KP, Sosialisasi Pedoman PERMATA dan Rakor PERMATA APBD. Setiap kegiatan terdiri dari beberapa sub kegiatan yang harus di laksanakan dengan output masing-masing dan ditunjukkan evidence / buktinya. Rincian capaian Milestone rencana strategis jangka pendek proyek perubahan berdasarkan kegiatan dan sub kegiatan disertai output masing-masing sbb:

No	Uraian Kegiatan	Penang Jwb	Waktu Pelaksanaan		Output Tahapan Evidence		Ket
			Renc	Real	Renc	Real	
Tahapan Jangka Pendek			Renc	Real	Renc	Real	
1.	Pedoman PERMATA Lokpri KP	Project Leader			Pdm Permata, SK Sekda	Pdm Permata, Pergub	Melampaui
a.	Membuat SK Tim Efektif		IV Sep	05 Agu	SK Tim Efektif	SK Tim Efektif	Sesuai
b.	Rapat Persiapan		IV Sep	03 Okt	Daftar hadir	Daftar hadir	Sesuai
c.	Buat Draf Pedoman Permata, SK Sekda		I-II Okt	07-18 Okt	Draf Permata, SK Sekda	Draf PERGUB PERMATA	Melampaui
d.	Persetujuan Sekda ttg Pedoman Permata		III Okt	23 Okt	SK Sekda ttg Permata	PERGUB PERMATA	Melampaui
2.	Sosialisasi Pedoman PERMATA	Project Leader			Tersosialisasi	Tersosialisasi	Sesuai
a.	Membuat, distribusi undangan		IV Okt	29 Okt	Undangan	Undangan	Sesuai
b.	Rapat Sosialisasi PERMATA		I Nop	31 Okt	Lap. Sosialisasi	Lap Sosialisasi	Sesuai
c.	Tdd BA Kesepahaman bersama		I Nop	31 Okt	BA Kesepahaman	BA Kesepahaman	Sesuai
3.	Rakor Permata APBD	Project Leader			Terlaksana Rakor	Terlaksana Rakor	Sesuai
a.	Rapat persiapan Tim Efektif		II Nop	05 Nop	Daftar hadir	Daftar hadir	Sesuai
b.	Membuat, distribusi undangan		III Nop	05-06 Nop	Undangan	Undangan	Sesuai
c.	Rakor Permata		IV Nop	11-13 Nop	Rekomendasi, Laporan Rakor	Rekomendasi, Laporan Rakor	Sesuai

Tabel 4. Capaian Milestone rencana strategis jangka pendek

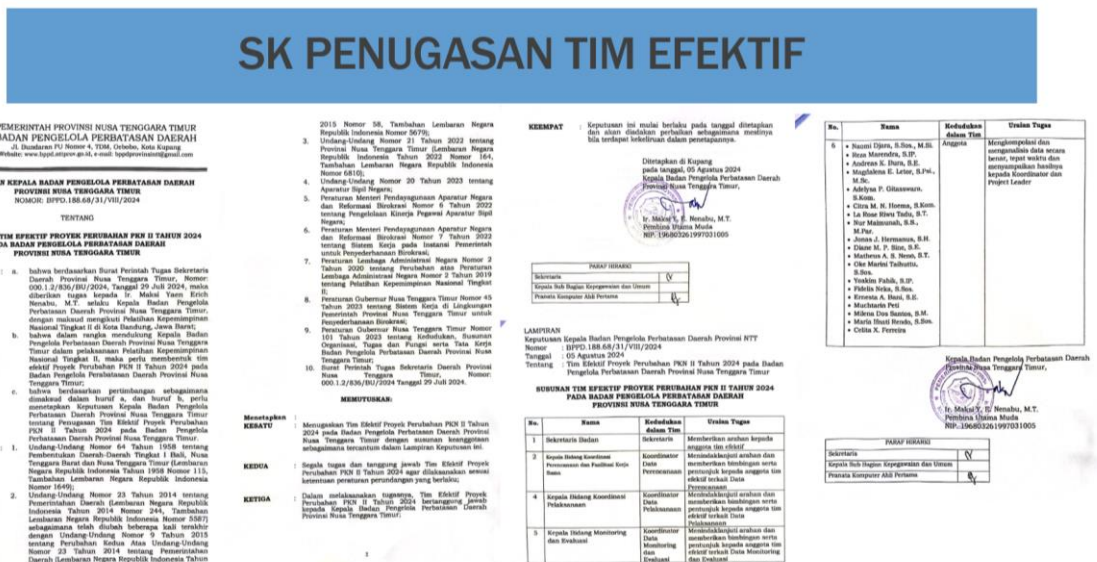
B. Evidence Milestone jangka pendek

Terdapat 3 (tiga) kegiatan strategis jangka pendek sesuai milistone rancangan proyek perubahan yaitu Pedoman PERMATA Lokpri KP (SK Sekda), Sosialisasi Pedoman PERMATA dan Rakor PERMATA APBD dengan masing-masing sub kegiatannya. Eviden / bukti yang disajikan berdasarkan masing-masing kegiatan strategis dan sub kegiatannya sbb:

1. Pedoman Penyusunan PERMATA - Pergub

a. Membuat SK Penugasan Tim Efektif

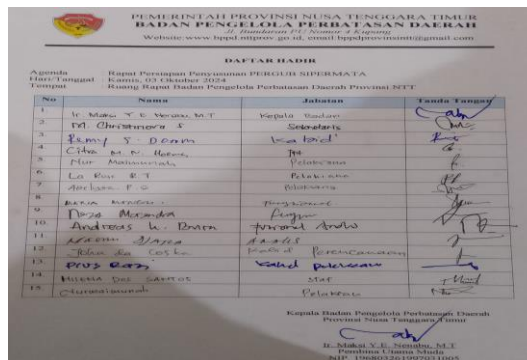
Pembuatan draf Pergub Permata diawali dengan penerbitan SK Penugasan Tim Efektif oleh Kepala BPPD Prov. NTT dengan Nomor: BPPD.188.68/31/VIII/2024 tanggal 05 Agustus 2024.



Gambar 6. SK Penugasan Tim Efektif

b. Rapat Persiapan Tim Efektif

Rapat persiapan Tim efektif bersama Project leader untuk menyusun draf Pergub pedoman penyusunan PERMATA dilaksanakan Kamis, 03 Oktober 2024 di kantor BPPD Prov. NTT.



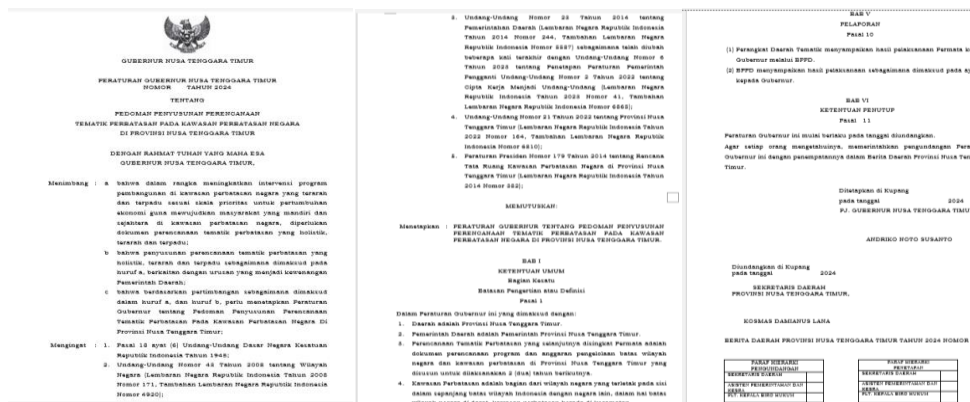
Gambar 7. Daftar Hadir Rapat Persiapan Tim Efektif



Gambar 8. Rapat Persiapan Tim Efektif

c. Buat draf pedoman penyusunan PERMATA - Pergub

Draf Pergub Pedoman penyusunan PERMATA disusun oleh Tim efektif bersama project leader dan di asistensi ke Biro hukum Pemerintah Provinsi NTT dan Bapperida NTT, semula direncanakan dalam bentuk Keputusan Sekretaris Daerah NTT kemudian ditingkatkan menjadi Peraturan Gubernur dengan pertimbangan luasnya ruang lingkup yang melibatkan lintas perangkat daerah tematik provinsi NTT.



Gambar 9. Draft Pergub Pedoman Penyusunan PERMATA


Draf Pergub Pedoman penyusunan PERMATA telah dibahas beberapa kali bersama Biro Hukum Setda NTT dan Bapperida NTT hingga disetujui untuk lanjut diajukan ke Sekda Provinsi NTT dan Pj. Gubernur NTT. Draf Pergub pedoman penyusunan PERMATA berisi 11 (sebelas) Pasal yang tergabung dalam 6 (enam) Bab yaitu Bab I Ketentuan Umum, Bab II Perencanaan dan Penyusunan, bab III Pelaksanaan, Bab IV Monitoring dan Evaluasi, Bab V Pelaporan dan Bab VI Ketentuan Penutup.



Gambar 10. Asistensi Draft Pergub Permata ke Biro Hukum

d. Peraturan Gubernur tentang pedoman penyusunan PERMATA

Pedoman penyusunan PERMATA semula direncanakan ditetapkan dalam Keputusan Sekda Provinsi NTT namun dengan mempertimbangkan luasnya ruang lingkup yang melibatkan lintas perangkat daerah tematik provinsi NTT maka dipandang perlu penetapannya di tingkatkan dengan Peraturan Gubernur.



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 64 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN PERENCANAAN
TEMATIK PERBATASAN PADA KAWASAN PERBATASAN NEGARA
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Meningkat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4920);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah (ugganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
5. Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 382);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERENCANAAN TEMATIK PERBATASAN PADA KAWASAN PERBATASAN NEGARA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Batasan Pengertian atau Definisi
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Perencanaan Tematik Perbatasan yang selanjutnya disingkat Permata adalah dokumen perencanaan program dan anggaran pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang disusun untuk dilaksanakan 2 (dua) tahun berikutnya.
4. Kawasan Perbatasan adalah bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal batas wilayah negara di darat, kawasan perbatasan berada di kecamatan.

BAB V
PELAPORAN
Pasal 10

(1) Perangkat Daerah Tematik menyampaikan hasil pelaksanaan Permata kepada Gubernur melalui BPPD.

(2) BPPD menyampaikan hasil pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 23 Oktober 2024
PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

(Signature)
ANDRIKO NOTO SUBANTO

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 23 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

(Signature)
KOMAS DAMIANUS LANA

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 054

PARAF HIERAKSI PENGURUSAN	PARAF HIERAKSI PENGURUSAN
SEKRETARIS DAERAH	SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN UMUM	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN UMUM
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	PLT. KEPALA BIRO HUKUM

Gambar 11. Pergub Pedoman Penyusunan Permata

Terhadap undangan yang tidak dapat hadir karena berbagai alasan rencananya disediakan link zoom yang akan dibagikan saat sebelum kegiatan sosialisasi berlangsung. Stakeholder yang diundang sebanyak 30 (tiga puluh) orang yang terdiri dari: BPPD Provinsi NTT, Bapperida Prov. NTT, OPD Tematik, dan BPPD/Bapperida Kabupaten Perbatasan.

b. Rapat Sosialisasi Pergub pedoman penyusunan PERMATA

Rapat Sosialisasi Peraturan Gubernur tentang Pedoman penyusunan perencanaan tematik perbatasan (Permata) perlu dilakukan untuk mensosialisasikan Pergub Permata kepada semua stakeholders terkait yang akan berdampak langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan Pergub tersebut. Kegiatan Rapat Sosialisasi Pergub pedoman penyusunan PERMATA dilaksanakan pada Kamis, 31 Oktober 2024 bertempat di Ruang rapat Asisten Setda Provinsi NTT.

Rapat sosialisasi didahului dengan sambutan sekaligus membuka kegiatan oleh Pj. Gubernur NTT Bapak Andriko Noto Susanto yang diwakili oleh Asisten I bidang Kesra ibu Bernadeta Usboko dan dihadiri oleh perangkat daerah tematik perbatasan provinsi NTT dan perangkat daerah kabupaten perbatasan serta unsur PLBN. Stakeholders terkait lain yang tidak dapat hadir secara langsung dalam kegiatan sosialisasi ini dapat mengikuti dan menerima informasinya melalui link zoom yang disediakan, website BPPD NTT dan media sosial BPPD NTT. Rapat Sosialisasi Pergub Permata dihadiri sebanyak 60 (enam puluh) orang yang terdiri dari: BPPD Provinsi NTT, Bapperida Prov. NTT, OPD Tematik, dan BPPD/Bapperida Kabupaten Perbatasan.

NO	NAMA PESERTA	JABATAN	AGANS/INSTANSI	KEHADIRAN	TANDA TANGAN
1	Andriko Noto Susanto	Pj. Gubernur	BPPD NTT	ada	
2	Andriko Noto Susanto	Pj. Gubernur	BPPD NTT	ada	
3	Andriko Noto Susanto	Pj. Gubernur	BPPD NTT	ada	
4	Andriko Noto Susanto	Pj. Gubernur	BPPD NTT	ada	
5	Andriko Noto Susanto	Pj. Gubernur	BPPD NTT	ada	
6	Andriko Noto Susanto	Pj. Gubernur	BPPD NTT	ada	
7	Andriko Noto Susanto	Pj. Gubernur	BPPD NTT	ada	
8	Andriko Noto Susanto	Pj. Gubernur	BPPD NTT	ada	
9	Andriko Noto Susanto	Pj. Gubernur	BPPD NTT	ada	
10	Andriko Noto Susanto	Pj. Gubernur	BPPD NTT	ada	
11	Andriko Noto Susanto	Pj. Gubernur	BPPD NTT	ada	
12	Andriko Noto Susanto	Pj. Gubernur	BPPD NTT	ada	
13	Andriko Noto Susanto	Pj. Gubernur	BPPD NTT	ada	
14	Andriko Noto Susanto	Pj. Gubernur	BPPD NTT	ada	
15	Andriko Noto Susanto	Pj. Gubernur	BPPD NTT	ada	
16	Andriko Noto Susanto	Pj. Gubernur	BPPD NTT	ada	
17	Andriko Noto Susanto	Pj. Gubernur	BPPD NTT	ada	
18	Andriko Noto Susanto	Pj. Gubernur	BPPD NTT	ada	
19	Andriko Noto Susanto	Pj. Gubernur	BPPD NTT	ada	
20	Andriko Noto Susanto	Pj. Gubernur	BPPD NTT	ada	
21	Andriko Noto Susanto	Pj. Gubernur	BPPD NTT	ada	
22	Andriko Noto Susanto	Pj. Gubernur	BPPD NTT	ada	
23	Andriko Noto Susanto	Pj. Gubernur	BPPD NTT	ada	
24	Andriko Noto Susanto	Pj. Gubernur	BPPD NTT	ada	
25	Andriko Noto Susanto	Pj. Gubernur	BPPD NTT	ada	
26	Andriko Noto Susanto	Pj. Gubernur	BPPD NTT	ada	
27	Andriko Noto Susanto	Pj. Gubernur	BPPD NTT	ada	
28	Andriko Noto Susanto	Pj. Gubernur	BPPD NTT	ada	
29	Andriko Noto Susanto	Pj. Gubernur	BPPD NTT	ada	
30	Andriko Noto Susanto	Pj. Gubernur	BPPD NTT	ada	
31	Andriko Noto Susanto	Pj. Gubernur	BPPD NTT	ada	
32	Andriko Noto Susanto	Pj. Gubernur	BPPD NTT	ada	
33	Andriko Noto Susanto	Pj. Gubernur	BPPD NTT	ada	
34	Andriko Noto Susanto	Pj. Gubernur	BPPD NTT	ada	
35	Andriko Noto Susanto	Pj. Gubernur	BPPD NTT	ada	
36	Andriko Noto Susanto	Pj. Gubernur	BPPD NTT	ada	
37	Andriko Noto Susanto	Pj. Gubernur	BPPD NTT	ada	
38	Andriko Noto Susanto	Pj. Gubernur	BPPD NTT	ada	
39	Andriko Noto Susanto	Pj. Gubernur	BPPD NTT	ada	
40	Andriko Noto Susanto	Pj. Gubernur	BPPD NTT	ada	
41	Andriko Noto Susanto	Pj. Gubernur	BPPD NTT	ada	
42	Andriko Noto Susanto	Pj. Gubernur	BPPD NTT	ada	
43	Andriko Noto Susanto	Pj. Gubernur	BPPD NTT	ada	
44	Andriko Noto Susanto	Pj. Gubernur	BPPD NTT	ada	
45	Andriko Noto Susanto	Pj. Gubernur	BPPD NTT	ada	
46	Andriko Noto Susanto	Pj. Gubernur	BPPD NTT	ada	
47	Andriko Noto Susanto	Pj. Gubernur	BPPD NTT	ada	
48	Andriko Noto Susanto	Pj. Gubernur	BPPD NTT	ada	
49	Andriko Noto Susanto	Pj. Gubernur	BPPD NTT	ada	
50	Andriko Noto Susanto	Pj. Gubernur	BPPD NTT	ada	
51	Andriko Noto Susanto	Pj. Gubernur	BPPD NTT	ada	
52	Andriko Noto Susanto	Pj. Gubernur	BPPD NTT	ada	
53	Andriko Noto Susanto	Pj. Gubernur	BPPD NTT	ada	
54	Andriko Noto Susanto	Pj. Gubernur	BPPD NTT	ada	
55	Andriko Noto Susanto	Pj. Gubernur	BPPD NTT	ada	
56	Andriko Noto Susanto	Pj. Gubernur	BPPD NTT	ada	
57	Andriko Noto Susanto	Pj. Gubernur	BPPD NTT	ada	
58	Andriko Noto Susanto	Pj. Gubernur	BPPD NTT	ada	
59	Andriko Noto Susanto	Pj. Gubernur	BPPD NTT	ada	
60	Andriko Noto Susanto	Pj. Gubernur	BPPD NTT	ada	

Gambar 14. Daftar Hadir Rapat Sosialisasi Permata

Seluruh rangkaian kegiatan dan hasil Sosialisasi Pergub Permata dituangkan dalam Laporan Sosialisasi Permata Nomor: BPPD.188.3/61/XI/2024 tanggal, 04 November 2024



Gambar 15. Laporan Sosialisasi Permata



Gambar 16. Kegiatan Sosialisasi Permata

c. Tanda tangan Berita Acara Kesepahaman bersama

Penandatanganan Berita Acara Kesepahaman bersama sebagai wujud seluruh stakeholder yang diundang sebagai peserta Rapat Sosialisasi telah sepaham, memahami dan siap melaksanakan amanah Pergub pedoman penyusunan PERMATA tersebut dengan penuh rasa tanggung jawab. Berita Acara Kesepahaman bersama Pergub pedoman penyusunan PERMATA Nomor: BPPD.008/250.1/UM/X/2024 Tanggal, 31 Oktober 2024 ditandatangani oleh seluruh stakeholder terkait yaitu dari unsur BPPD Provinsi, BPPD kabupaten, Perangkat Daerah Tematik dan Sekda Prov. NTT ub. Asisten Pemerintahan dan Kesra.

BERITA ACARA KESEPAHAMAN

SOSIALISASI PERATURAN GUBERNUR NTT
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERENCANAAN
TEMATIK PERBATASAN PADA KAWASAN PERBATASAN NEGARA
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Nomor : BPPD.008/250.1/UM/X/2024

Ruang Rapat Asisten – Kantor Gubernur NTT – Kupang, 31 Oktober 2024

Pada hari ini, Kamis, Tiga Puluh Satu Oktober Dua Ribu Dua Puluh Empat (31-10-2024), bertempat di Ruang Rapat Asisten – Kantor Gubernur NTT – Kota Kupang, telah dilaksanakan Sosialisasi Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Tematik Perbatasan Pada Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dihadiri oleh Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Perbatasan dan Perangkat Daerah Tematik Lingkup Pemerintah Provinsi NTT.

Peserta Sosialisasi beresapkat:

- Mewujudkan Perencanaan Tematik Perbatasan Pada Kawasan Perbatasan Negara (Permata) di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang pedoman penyusunan Permata merupakan acuan bagi Perangkat Daerah Tematik dalam penyusunan perencanaan Pembangunan di kawasan perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi NTT dan Badan Perencanaan, Pembangunan dan Kemitraan Inovasi Daerah Provinsi NTT beresama-sama berkoordinasi mengawal Permata mulai dari tahapan perencanaan hingga penetapan program dan anggaran;
- Perangkat Daerah Tematik wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Permata kepada Gubernur melalui Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi NTT pada akhir tahun anggaran.

Demikian Berita Acara Kesepahaman Sosialisasi Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Tematik Perbatasan pada Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur dibuat dan disepakati untuk dilaksanakan bersama.

Perwakilan Peserta Sosialisasi :		Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Prov. NTT Ir. Mahdi Y. E. Nembu, M.T. Kepala BPPD Kab. Belu Jolan Constantinus, S.P., Amd., SE a.n. Kepala Dinas Sekda Prov. NTT Kepala Bidang Perencanaan dan Jaminan Sosial David A. Natun, S.ST a.n. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Pangan Prov. NTT Kepala UPTD PKDLPIP Ir. Maria L.P. Manrik, M. Si a.n. Kepala Dinas Perikanan Prov. NTT Penguasa BMD Ternak Roven O. Lator, S.P., M.S a.n. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. NTT Perencana Ahli Muda Lambertus Dope, S.Kom	Kepala BPPD Kab. TTU Hasonorus Abi, S.Sos., M.Si a.n. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Prov. NTT Adiputra Ahli Muda Frouda A. Nembuis, S.ST a.n. Kepala Dinas EDCM Prov. NTT Analis Tata Usaha Kondrius Mahu, S.T a.n. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov. NTT Analis Kebijakan Ahli Muda a.n. Kepala Dinas Perikanan Prov. NTT Penguasa Perikanan Agustinus Fr. Heli, S.Pi a.n. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTT Kepala Seksi Angkutan Pengangkutan Ayos P.Y. Lavo Bay, S.STP	a.n. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. NTT Analis Data dan Informasi Yatur Dima, S.Kom a.n. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. NTT Penguasa Umum M. Anok Jem Prastya, S.Pi	a.n. Kepala Biro Hukum Sekda Provinsi NTT Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda Oremulus Pulu, S1 MPA a.n. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT Analis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Victor Faust, S.STP

Mengetahui,
Asisten Pemerintahan dan Kesra
Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur,

 Dm. Beroneta Meriani Jabok, MSi
 Pembina Utama Madya (IV/B)
 NIP. 19650516199030009

Gambar 17. B.A. Kesepahaman bersama



Gambar 18. Tanda tangan B.A. kesepahaman bersama

3. Rakor PERMATA APBD

a. Rapat persiapan Tim Efektif

Rapat persiapan Tim Efektif dalam rangka Rakor Penyusunan Permata dilaksanakan pada tanggal 05 November 2024 dimaksudkan untuk mempersiapkan semua kebutuhan administrasi dan teknis pelaksanaan agar Rakor Penyusunan PERMATA yang akan dilaksanakan dapat berjalan dengan baik dan lancar.



Gambar 19. Rapat Persiapan Rakor Permata

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
Jl. Hutan Raya P.J. Ni'man-4 Kupang
Website: www.tptp.ntprov.go.id, email: bpd@pbatrasda.ntt@gmail.com

DAFTAR HADIR

Agenda: RAPAT PERSIAPAN RAKOR PERMATA
Hari/Tanggal: Selasa, 05 November 2024
Tempat: Ruang Rapat Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi NTT

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	M. N. N. N.	Kepala Badan	[Signature]
2.	M. O. O. O.	Sekretaris	[Signature]
3.	J. J. J. J.	Kepala Bidang	[Signature]
4.	P. P. P. P.	Kepala Bidang	[Signature]
5.	R. R. R. R.	Kepala Bidang	[Signature]
6.	A. A. A. A.	Staf	[Signature]
7.	M. M. M. M.	Staf	[Signature]
8.	N. N. N. N.	Staf	[Signature]
9.	H. H. H. H.	Staf	[Signature]
10.	A. A. A. A.	Staf	[Signature]
11.	C. C. C. C.	Staf	[Signature]
12.	D. D. D. D.	Staf	[Signature]
13.	E. E. E. E.	Staf	[Signature]
14.	F. F. F. F.	Staf	[Signature]
15.	G. G. G. G.	Staf	[Signature]
16.	H. H. H. H.	Staf	[Signature]
17.	I. I. I. I.	Staf	[Signature]
18.	J. J. J. J.	Staf	[Signature]
19.	K. K. K. K.	Staf	[Signature]
20.	L. L. L. L.	Staf	[Signature]

21.	Marselaul Beto	Staf	[Signature]
22.	Celitu X. Perosa	Staf	[Signature]
23.	Milena Dos Santos	Staf	[Signature]
24.	Bernygn Nani	Staf	[Signature]
25.	Le Bie R.T.	Pramuka Ahli Pertama	[Signature]
26.	Rafael Thomas	Staf	[Signature]
27.	Rafael	Staf	[Signature]
28.	Max Ale	Staf	[Signature]
29.	Prakomah E. Alendil	Staf	[Signature]
30.	Priyaa Karulu	Staf	[Signature]

Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Dr. Miki Y. E. Nembu, M.T.
Pembina Utama Madya
NIP. 198803261997031005

Gambar 20. Daftar Hadir Rapat Persiapan Rakor Permata

b. Membuat, distribusi undangan

Tim Efektif membuat dan mendistribusikan undangan kegiatan rapat koordinasi perbatasan Tingkat Provinsi dalam rangka Penyusunan Permata sumber dana APBD NTT dengan undangan Nomor: BU.400.14.1.1/735/BPPD/2024 Tanggal 5 November 2024.

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Raja G. F. Ni'man-5, Kupang 85111
Website: www.tptp.ntt.go.id

Nomor: BU.400.14.1.1/735/BPPD/2024
Lampiran: 1 (satu) lembar
Materi: Mengundang Rapat

Yth. Kepala Bidang Perbatasan
Meningkatkan (dalam bertaqwa)

Tempat: [Blank]

Dalam rangka meningkatkan intervensi program lintas perbatasan daerah di kawasan perbatasan negara, dibutuhkan adanya sistem perencanaan pembangunan berbasis pendekatan dengan sumber dana APBD, sebagai wujud implementasi Perencanaan Daerah yang berorientasi Perencanaan Pembangunan Perbatasan (PERMATA).

Selanjutnya dengan ini Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Tahun Anggaran 2024 akan melaksanakan Rapat Koordinasi Perbatasan Tingkat Provinsi NTT pada:

Hari/tanggal: Selasa, 11-13 November 2024
Jenis: [Blank]
Tempat: [Blank]

Sebagai bentuk kerendahan hati, maka mohon kebijaksanaan Bpk/Bu agar untuk menghadiri pertemuan tersebut, yang meliputi kegiatan pembukaan dengan membaca data sumber rencana program/kegiatan pembangunan tahun 2024 di kawasan perbatasan dan rencana kerja dan strategi lintas perbatasan.

Platua penyelenggara menyediakan akomodasi dan konsumsi sedangkan biaya perjalanan akan ditanggung oleh masing-masing instansi. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Narahubung Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ibu Maria M. Mungu Nomor HP: 08123943874 atau Ibu Magdalena E. Lita Nomor HP: 08222023105.

Denkiran Pemohonan kami, atas perhatian dan kesediaannya diampikan

lmtima kasih,

a.n. Gubernur Nusa Tenggara Timur
Sekretaris Daerah
u.b.
Kepala Bidang Perbatasan dan Kerja,
Badan Pengelola Perbatasan Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur
NIP. 196203151962032009

Tertujukan:
1. P. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (dalam bertaqwa)
2. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang
3. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang
4. Kepala Bidang Kabupaten Timor Tengah Utara di Belenambau.

Paraf Hierarki
Kaban BPPD Provinsi NTT [Signature]
Sekretaris [Signature]
Kepala Bidang Monitoring dan Evaluasi [Signature]
Analisa Kebijakan AN Muda [Signature]

Lampiran: BPPD 3141/13/BPPD/2024
Nomor: BPPD 3141/13/BPPD/2024
Tanggal: 05 November 2024

No	Nama Pesangkir Daerah	Jumlah Pesangkir
1	Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Inovasi	1 Orang
2	Kepala Bidang Perencanaan dan Koordinasi Regional	1 Orang
3	Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi Hasil Poin NTT	1 Orang
4	Kepala Bidang Perencanaan dan Koordinasi Regional	1 Orang
5	Kepala Bidang Perencanaan dan Koordinasi Regional	1 Orang
6	Kepala Bidang Perencanaan dan Koordinasi Regional	1 Orang
7	Kepala Bidang Perencanaan dan Koordinasi Regional	1 Orang
8	Kepala Bidang Perencanaan dan Koordinasi Regional	1 Orang
9	Kepala Bidang Perencanaan dan Koordinasi Regional	1 Orang
10	Kepala Bidang Perencanaan dan Koordinasi Regional	1 Orang
11	Kepala Bidang Perencanaan dan Koordinasi Regional	1 Orang
12	Kepala Bidang Perencanaan dan Koordinasi Regional	1 Orang
13	Kepala Bidang Perencanaan dan Koordinasi Regional	1 Orang
14	Kepala Bidang Perencanaan dan Koordinasi Regional	1 Orang
15	Kepala Bidang Perencanaan dan Koordinasi Regional	1 Orang
16	Kepala Bidang Perencanaan dan Koordinasi Regional	1 Orang

Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Dr. Miki Y. E. Nembu, M.T.
Pembina Utama Madya
NIP. 198803261997031005

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Raja G. F. Ni'man-5, Kupang 85111
Website: www.tptp.ntt.go.id

Nomor: BU.400.14.1.1/735/BPPD/2024
Lampiran: 1 (satu) lembar
Materi: Mengundang Rapat

Yth. Kepala Bidang Perbatasan
Meningkatkan (dalam bertaqwa)

Tempat: [Blank]

Dalam rangka meningkatkan intervensi program lintas perbatasan daerah di kawasan perbatasan negara, dibutuhkan adanya sistem perencanaan pembangunan berbasis pendekatan dengan sumber dana APBD, sebagai wujud implementasi Perencanaan Daerah yang berorientasi Perencanaan Pembangunan Perbatasan (PERMATA).

Selanjutnya dengan ini Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Tahun Anggaran 2024 akan melaksanakan Rapat Koordinasi Perbatasan Tingkat Provinsi NTT pada:

Hari/tanggal: Selasa, 11-13 November 2024
Jenis: [Blank]
Tempat: [Blank]

Sebagai bentuk kerendahan hati, maka mohon kebijaksanaan Bpk/Bu agar untuk menghadiri pertemuan tersebut, yang meliputi kegiatan pembukaan dengan membaca data sumber rencana program/kegiatan pembangunan tahun 2024 di kawasan perbatasan dan rencana kerja dan strategi lintas perbatasan.

Platua penyelenggara menyediakan akomodasi dan konsumsi sedangkan biaya perjalanan akan ditanggung oleh masing-masing instansi. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Narahubung Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ibu Maria M. Mungu Nomor HP: 08123943874 atau Ibu Magdalena E. Lita Nomor HP: 08222023105.

Denkiran Pemohonan kami, atas perhatian dan kesediaannya diampikan

lmtima kasih,

a.n. Gubernur Nusa Tenggara Timur
Sekretaris Daerah
u.b.
Kepala Bidang Perbatasan dan Kerja,
Badan Pengelola Perbatasan Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur
NIP. 196203151962032009

Tertujukan:
1. P. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (dalam bertaqwa)
2. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang
3. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang
4. Kepala Bidang Kabupaten Timor Tengah Utara di Belenambau.

Paraf Hierarki
Kaban BPPD Provinsi NTT [Signature]
Sekretaris [Signature]
Kepala Bidang Monitoring dan Evaluasi [Signature]
Analisa Kebijakan AN Muda [Signature]

Lampiran: BPPD 3141/13/BPPD/2024
Nomor: BPPD 3141/13/BPPD/2024
Tanggal: 05 November 2024

No	Daftar Undangan
1	P. Bupati Kupang
2	P. Bupati Timor Tengah Selatan
3	P. Bupati Timor Tengah Utara
4	P. Bupati Belu
5	P. Bupati Malaka
6	P. Bupati Rote Ndao
7	P. Bupati Aor
8	Bupati Sabu Raijua
9	P. Bupati Sumba Timur
10	P. Bupati Sumba Barat
11	P. Bupati Sumba Barat Daya
12	P. Bupati Sumba Tengah

Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Dr. Miki Y. E. Nembu, M.T.
Pembina Utama Madya
NIP. 198803261997031005

Gambar 21. Undangan Rakor Permata

Seluruh rangkaian pelaksanaan Rakor Permata dan hasilnya yang diselenggarakan di Kefamenanu, kabupaten TTU dari tanggal 11-13 November di tuangkan dalam Laporan Rakor Permata dengan Nomor: BPPD.188.3/62/XI/2024 tanggal, 14 November 2024



Gambar 23. Laporan Rakor Permata



Gambar 24. Kegiatan Rakor Permata

DAFTAR HADIR PERMATA					
KEGATAN RAPAT KOORDINASI PERBATASAN TERLUKAT PERSAWA MASA TANGGARA TAMBUR DI KABUPATEN TTU					
NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN	ASAL INSTANSI	TANDA TANGAN Hari/Tanggal Bulan, Tgl, 2024
1	Tika Tika	Staf	Perante	SPDRM Kab. TTU	
2	Baherudin Thoriq SE	Camat	Perante	Kecamatan Maba	
3	Fira Nggitu	Plt. Kabid PSM	Perante	BPPD Kab. Kupang	
4	Aphrad Lali	Staf	Perante	BPPD Kab. Kupang	
5	Maria Nissa, S.P	Camat	Perante	Kecamatan Blom Ubra	
6	Alvin Z. T. Koo, S.Pi	Kepala Bidang	Perante	Kepolisian Kab. Sumba Barat	
7	Krisnan Darga Uda, S.Pi	Staf Administrasi	Perante	Kepolisian Kab. Sumba Barat	
8	Yohanes Yusuf Mulu	Kabid Program Pelebaran	Perante	BPPD Kab. TTU	
9	Yohanes Mulu, S.P	Kepidat Fasilitas Perbatasan	Perante	BPPD Kab. TTU	
10	Mawar Sari	Perante	Perante	BPPD Kab. TTU	
11	Uyir, A. Mli	Perante	Perante	BPPD Kab. Sumba	
12	Luluka Permata, ST	Perencana Adm. Mulu	Perante	Bappenas Kab. Sumba	
13	Chris J. Salsu Jansa, ST, MT	Kepala Cabang	Perante	Dinas ESEM Prov. NTT	
14	Yohanes Tapa Don	Kepidat Bina Angkutan Jalan	Perante	Dinas Perhubungan Prov. NTT	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN	ASAL INSTANSI	TANDA TANGAN Hari/Tanggal Bulan, Tgl, 2024
15	Indonesius Kati, SE	Camat	Perante	Kecamatan Blom Ubra	
16	Harunul L. D. M. Doukani	Arakid Kabupaten Ahi Partama	Perante	Kecamatan Kab. Sumba Barat	
17	Apolonia S. Uhm, S.Pi	Camat	Perante	Kecamatan Blom Ubra	
18	Gusti Koko, ST, M.Eng	Camat	Perante	Kecamatan Nelahe	
19	Purta Permenty	Arakid Angkutan	Perante	Dinas Perhubungan Prov. NTT	
20	Indonesius Kati, S.STP	Camat	Perante	Kecamatan Inana Ubra	
21	Yohanes Nelson, S.Pi	Camat	Perante	Kecamatan Murotu Barat	
22	Harun-G. Laka, S.Pi, MS	Pengawas Bina Ternak	Perante	Dinas Perikanan Prov. NTT	
23	Yohanes Aha Bora, SE	Kabid Koordinasi Perencanaan	Perante	BPPD Kab. Sumba	
24	Melanius Koro	Camat	Perante	Kecamatan Kiri	
25	Indonesius M. Nataru, ST	Kabid PAK, Perencana dan Tata RENCANA	Perante	Bappenas Kab. Sumba	
26	Uyir D. A. Karamun, SH	Kepala Badan	Perante	Bappenas Kab. Sumba	
27	Melanius T. G. Darlino	Kabid Infrastruktur dan RENCANA	Perante	Bappenas Kab. Sumba	
28	Dionisius Agin	Kabid Perencanaan dan RENCANA	Perante	Bappenas Kab. Sumba	
29	Demas I. Laka, S.Pi	Staf	Perante	Bappenas Kab. Sumba	
30	Dionisius Yala	Sekretaris Camat	Perante	Kecamatan Blom Ubra	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN	ASAL INSTANSI	TANDA TANGAN Hari/Tanggal Bulan, Tgl, 2024
31	Rentan D. Sali	Perencana Adm. Mulu	Perante	Bappenas Kab. TTU	
32	Andreas A. Sasa, ST, Msc.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Perante	Bappenas Kab. Maba	
33	Peduli B. Taha	Manajer	Perante	BPPD Kab. TTU	
34	Bertholomeus B. D. Koro, S.Ag	Ketua DPW	Perante	Sekretariat Daerah Kab. TTU	
35	Adriane Pihu Hamu Eli, S.Sos	Staf Protokol	Perante	Sekretariat Daerah Kab. TTU	
36	Randy Koko, ST	Ketua DPW dan Keuangan	Perante	BPPD Kab. TTU	
37	Fuad Ramda Karah, A.Mli	Staf	Perante	Kepolisian Kab. Sumba Barat	
38	Onyus Yulda	Kepidat Fasilitas Kesehatan	Perante	BPPD Kab. TTU	
39	Tasar R. Nibari	Perencana	Perante	Bappenas Kab. Rote NRE	
40	Aptaria Onko, SE	Perencana	Perante	BPPD Kab. TTU	
41	M. F. Fauz Nibari, S.Pi, M.Si	Ketua Pemerintahan	Perante	BPPD Kab. TTU	
42	Saranda Laka, S.Sos	Camat	Perante	Kecamatan Blom Ubra	
43	Jerry A. I. Maja	Arakid Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Perante	Dinas Perencanaan dan RENCANA Prov. NTT	
44	Antonius Sap	Staf	Perante	Dinas Perencanaan dan RENCANA Prov. NTT	
45	Carolina Mayaki Ch. Wano	Perencana Adm. Mulu	Perante	Bappenas Prov. NTT	
46	Doni Suryandari	Perencana Madya	Perante	Bappenas Prov. NTT	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN	ASAL INSTANSI	TANDA TANGAN Hari/Tanggal Bulan, Tgl, 2024
47	Agustinus Anson	Staf	Perante	Kecamatan Blom Ubra	
48	Agustinus Kio	Staf	Perante	Kecamatan Blom Ubra	
49	Yulda Nasa	Staf	Perante	Sekretariat Daerah Kab. TTU	
50	Yohanes S. Nara	Staf	Perante	Sekretariat Daerah Kab. TTU	
51	Yulda Nasa	Staf	Perante	Sekretariat Daerah Kab. TTU	
52	Emmanuel Laka	Staf	Perante	BPPD Kab. TTU	
53	Onyus Laka	Staf	Perante	Dinas Perhubungan Kab. TTU	
54	Emmanuel Ebrahe	Staf	Perante	BPPD Kab. TTU	
55	Thaddeus Nalari	Staf	Perante	Kecamatan Murotu Barat	
56	Pradikus Tama	Staf	Perante	Kecamatan Nelahe	
57	Indonesius Bismar	Staf	Perante	Kecamatan Kiri	
58	Agustinus Anson	Staf	Perante	Kecamatan Blom Ubra	
59	Yulda Nasa	Staf	Perante	Kecamatan Maba	
60	Antonius Nasa	Staf	Perante	Kecamatan Blom Ubra	

Gambar 25. Daftar Hadir Rakor Permata

2. IMPLEMENTASI STRATEGI MARKETING

Strategi marketing dalam implementasi jangka pendek proyek perubahan untuk mendukung pembangunan pada Lokpri Kawasan perbatasan adalah 4P1C sbb:

1. Produk : SIPERMATA LOKPRI KP,
Rencana produk: Pedoman PERMATA SK. Sekda, Laporan Sosialisasi Permata, B.A. Kesepahaman bersama, Rekomendasi Rakor dan Laporan Rakor Permata.

Realisasi Produk : Pergub Pedoman PERMATA (melampaui target), Laporan Sosialisasi Permata, B.A. Kesepahaman bersama, Rekomendasi Rakor dan Laporan Rakor Permata.

- Eviden:
- a. Pergub Pedoman penyusunan PERMATA Nomor 54 Tahun 2024, Tanggal 23 Oktober 2024 sesuai gambar 11 (sebelas)
 - b. B.A. Kesepahaman bersama tanggal 31 Oktober 2024 sesuai gambar 17 (tujuh belas)
 - c. Laporan Sosialisasi Pergub Permata Nomor: BPPD.008/250.1/UM/X/2024 Tanggal 31 Oktober 2024 sesuai gambar 15 (lima belas)
 - d. Rekomendasi Rakor Permata Nomor: BPPD/008/265/UM/XI/2024 Tanggal 12 November 2024 sesuai gambar 22 (dua puluh dua)

- e. Laporan Rakor Permata Nomor: BPPD.188.3/62/XI/2024 Tanggal, 14 November 2024 sesuai gambar 23 (dua puluh tiga)

2. Place : BPPD NTT



Gambar 26. Kantor BPPD Prov. NTT di Kupang NTT

3. Promotion : Sosialisasi, rakor, website, media social dan Koran, Tujuannya agar diketahui dan diimplementasikan oleh stakeholders kawasan perbatasan.
- a. Laporan Sosialisasi Nomor: BPPD.188.3/61/XI/2024 tanggal 04 November 2024 yang berisi seluruh rangkaian kegiatan sosialisasi Pergub Permata Nomor 54 tahun 2024 tanggal 23 Oktober 2024. Laporan sosialisasi sesuai gambar 15 (lima belas).
- b. Laporan Rakor Permata Nomor: BPPD.188.3/62/XI/2024 Tanggal, 14 November 2024 yang berisi seluruh rangkaian kegiatan rakor Pergub Permata Nomor 54 tahun 2024 tanggal 23 Oktober 2024. Laporan rakor Permata sesuai gambar 23 (dua puluh tiga)



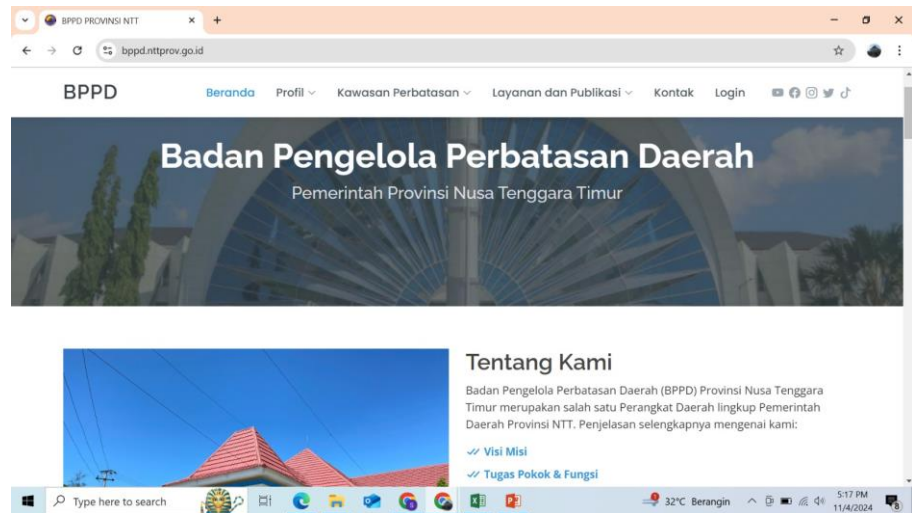
Link Berita Sosialisasi: <https://www.victorynews.id/ntt/33113857556/inovasi-permata-solusi-percepatan-pembangunan-lokpri-kawasan-perbatasan>

Link Berita Rakor: <https://www.victorynews.id/ntt/33113928572/bppd-gelar-rapat-koordinasi-perbatasan-tingkat-provinsi-ntt-hadirkan-12-kabupaten-perbatasan-dan-perangkat-daerah-tematik>



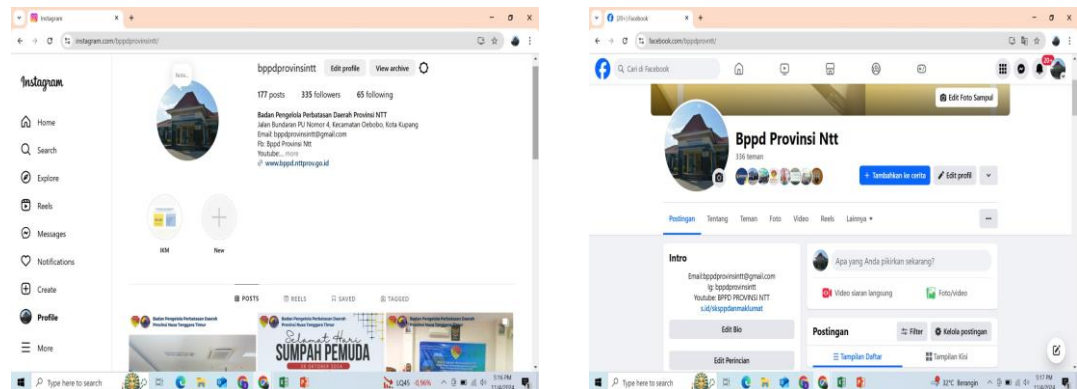
Gambar 26.a Berita Koran Rapat Sosialisasi dan Rakor Permata

c. Website BPPD NTT: bppd.nttprov.go.id



Gambar 27. Website BPPD NTT

Media sosial BPPD NTT: @Bppd Provinsi NTT (Facebook) dan @bppdprovinsintt (Instagram)



Gambar 28. Media Sosial BPPD Prov. NTT

4. Price : Free, produk ini disiapkan gratis untuk masyarakat perbatasan, perangkat daerah tematik provinsi dan kabupaten/kota melalui Sosialisasi, rakor, website, media sosial. Bahkan price atau nilai yang didapat adalah tidak terukur berupa meningkatnya intervensi Permata Lokpri KP dengan sumber dana APBD Provinsi.
5. Costumer : Masyarakat Lokpri kawasan perbatasan, perangkat daerah tematik provinsi dan kabupaten/kota yang terdampak langsung atau tidak langsung akan hadirnya produk PERMATA.



Gambar 29. Masyarakat perbatasan



Gambar 30. Perangkat Daerah Tematik Perbatasan



Dukungan dr OPD Tematik



Dukungan dr OPD Tematik



Dukungan dr PAMTAS RI



Dukungan dr Komisi I DPRD NTT



Dukungan dr Kemenkopohukam RI



Dukungan dr PLBN Motaain



Dukungan dr DitJen Bea Cukai Belu-NTT



Duk. dr Ses.BNPP & Deputi Bid. Pengelolaan BWN



Dukungan dr PLBN Napan



Dukungan dr OPD Tematik



https://drive.google.com/file/d/1iqx_F-IQI-eXJNsNaLsGOViUmtK8tlp2/view?usp=sharing



<https://drive.google.com/file/d/1svvuolOpNE5mm9Qbqzr1v15iPKT-jV-o/view?usp=sharing>

Gambar 31. Dukungan stakeholder perbatasan

3. IMPLEMENTASI STRATEGI PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Rencana strategi pengembangan kompetensi dalam proyek perubahan penting untuk memastikan bahwa tim efektif atau stakeholder terdampak proyek perubahan memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mencapai tujuan proyek.

No	Pihak Terdampak Tim Efektif	Perubahan Kompetensi yang Dibutuhkan	Cara Pengembangan Kompetensi
1.	Sekretaris BPPD	Perencanaan program	e-Learning/mentoring
2.	Analisis perencana	Perencanaan program	e-Learning/mentoring
3.	Kabid perencanaan	Perencanaan program	e-Learning/mentoring
4.	Pranata komputer	Perencanaan program	e-Learning/mentoring

Tabel 5. Rencana strategi pengembangan kompetensi

Strategi pengembangan kompetensi berupa mentoring atau coaching Tim efektif dilaksanakan untuk membangun pemahaman bersama dalam rangka melakukan inovasi perubahan dengan melaksanakan SIPERMATA dapat berjalan dengan lancar dan kontinyu yang didukung oleh Tim efektif yang memiliki kemampuan perencanaan program yang memadai.

Mentoring perencanaan program Pembangunan yang disampaikan oleh Narasumber BAPPERIDA Prov. NTT. Materi pendalaman mentoring perencanaan program dari BAPPERIDA Prov. NTT adalah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Mentoring ini juga mempelajari teknik pembahasan program dan anggaran dalam desk.



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 900.1.15.5-3406 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-5889
TAHUN 2021 TENTANG HASIL VERIFIKASI, VALIDASI DAN INVENTARISASI
PEMUTAKHIRAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN
PENGEMBANGAN DAN KEUANGAN DAERAH

MENTERI DALAM NEGERI,

SALINAN



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH**
Jln. Sandaran PI Nomor 04 Kupang
Website: www.bppd-ntt.go.id, email: bppd-ntt@gmail.com
Kupang, 05 November 2024

Nomor : BPPD.029/257/U/MX/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Konsolidasi Persiapan Rakor Perbatasan

Yth. Ptl. Kepala BAPPERIDA Provinsi Nusa Tenggara Timur
di:
Kupang

Dalam rangka wujud implementasi Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Tematik Perbatasan (PERMATA), Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi NTT akan mengadakan Rapat Koordinasi Perbatasan Tingkat Provinsi NTT yang direncanakan pada Hari/Tanggal, Senin 11 November 2024 di Kofa Kabupaten TTU. Sehubungan dengan hal tersebut maka Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi NTT mengundang BAPPERIDA Provinsi NTT untuk melakukan Rapat Komadidasi bersama guna mempersiapkan Rapat Koordinasi tersebut agar dapat berjalan dengan lancar dan sukses sesuai amanah Peraturan Gubernur dimaksud.

Rapat Komadidasi Persiapan Rakor Perbatasan Tingkat Provinsi NTT akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 07 November 2024
Waktu : 09.00 WITA – selesai
Tempat : Ruang Rapat Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi NTT

Damikian disampaikan atas perhatian, kerjasama dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur,



V. Masali Y. E. Nemasu, M.T.
Pembana Ujanika Madya
NIP. 19580326 199703 1 005

Tembusan:

1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang.
2. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

PARAF BERKAS	
Sekretaris	12
Keseling Kepegawaian dan Umum	12
Pelaksana	12



Gambar 32. Mentoring Tim Efektif

4. IMPLEMENTASI STRATEGI PENGEMBANGAN POTENSI DIRI

Hasil Pemetaan Sikap Perilaku Kepemimpinan yang dinilai bersama Mentor, dengan nilai:

- Integritas, sebesar 9,00 dengan kualifikasi Istimewa
- Kerjasama, sebesar 8,54 dengan kualifikasi Baik
- Mengelola Perubahan, sebesar 8,54 dengan kualifikasi Baik
- Nilai akhir Sikap Perilaku Kepemimpinan, sebesar 8,69 dengan kualifikasi Baik.

REKAP NILAI AKHIR SIKAP PERILAKU PESERTA

Nama Peserta	: Ir. Maksi Yaen Erich Nenabu, M.T.	Nama Mentor	: Kosmas D. Lana, S.H., M.Si
NIP	: 196803261997031005	NIP:	: 196509271990111000
Jabatan	: Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah	Jabatan	: Sekretaris Daerah
Instansi	: Pemerintah Provinsi NTT	Instansi	: Pemerintah Provinsi NTT
Program	: PKN Tk. II TA 2024		

	Nilai Komponen			Rata-Rata Total Sub Komponen	Kualifikasi Total Sub Komponen
	Sub Komponen Integritas	Sub Komponen Kerjasama	Sub Komponen Mengelola Perubahan		
Peserta	9,00	8,40	8,40	8,60	Baik
Mentor	9,00	8,60	8,60	8,73	Baik
Nilai Rata-Rata Per Sub Komponen	9,00	8,54	8,54	8,69	Baik
Kualifikasi Per Sub Komponen	Istimewa	Baik	Baik	Baik	

Keterangan Kualifikasi

9.00-10	Istimewa
7-8.99	Baik
5-6.99	Cukup
3-4.99	Kurang
1-2.99	Sangat Kurang

Akhir Sikap Perilaku
8,69
Kualifikasi:
Baik

Gambar 33. Pemetaan Sikap Perilaku Kepemimpinan

Berkaitan dengan hasil Pemetaan Sikap Perilaku Kepemimpinan, diperlukan Rencana Strategi Pengembangan Potensi Diri yang akan dilaksanakan pada implementasi aksi perubahan, sebagai berikut:

No	Sikap Perilaku	Rencana Strategi Pengembangan Potensi Diri
1.	Integritas	Mengikuti pembinaan rohani
2.	Kerjasama	Mengikuti giat kerja bhakti gabungan
3.	Mengelola Perubahan	Mengikuti seminar kepemimpinan

Tabel 6. Rencana Strategi Pengembangan Potensi Diri

Evidence Implementasi Strategi Pengembangan Potensi Diri



Gambar 34. Giat pembinaan Rohani



Gambar 35. Giat kerja bhakti



Gambar 36. Giat seminar kepemimpinan

5. KONTRIBUSI PROPER

Inovasi Proyek Perubahan dengan judul SIPERMATA Solusi Percepatan Pembangunan Lokasi Prioritas Kawasan Perbatasan jika di laksanakan oleh seluruh perangkat daerah tematik perbatasan provinsi maka akan menghasilkan usulan program dan anggaran pengelolaan perbatasan dan selanjutnya dapat diwujudkan dalam Pembangunan fisik.

Kontribusi proyek perubahan dalam bentuk usulan program dan anggaran pengelolaan perbatasan yang dihasilkan dalam rakor Permata yang selanjutnya dapat diwujudkan dalam Pembangunan fisik oleh perangkat daerah tematik perbatasan provinsi adalah sebesar Rp. 832.918.958.000 (Delapan ratus tiga puluh dua miliar Sembilan ratus delapan belas juta Sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

Anggaran sebesar ini akan mendorong meningkatnya pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan dan akhirnya dapat mewujudkan masyarakat kawasan perbatasan yang mandiri dan Sejahtera. Rincian Rekapitulasi Usulan Anggaran Program/Kegiatan T.A. 2026 APBDP pada Kawasan Perbatasan terdapat pada Lampiran 8.

6. KOMITMEN KEBERLANJUTAN PROYEK PERUBAHAN

Project Leader bersama Tim Efektif berkomitmen untuk melanjutkan implementasi Inovasi Proyek Perubahan “SIPERMATA, Solusi Percepatan Pembangunan Lokpri KP” pada tahapan jangka menengah dan jangka panjang sesuai dengan rencana waktu pelaksanaan seperti tabel 7.

No.	Uraian Kegiatan	Penang jwb	Waktu Pelaksanaan	Output tahapan
1.	JANGKA MENENGAH	Proj Leader		
a.	Membuat Juknis PERMATA Lokpri KP		Mei 2025	Juknis Penyusunan PERMATA
b.	Rekonsiliasi Permata APBD Lokpri KP		Juni 2025	BA Rekonsiliasi Permata
c.	Membuat SK Sekda tentang Permata Lokpri KP		Juni 2025	SK Sekda tentang Permata
2.	JANGKA PANJANG	Proj Leader		
a.	Monev implementasi PERMATA Lokpri KP		Jun & Des 2026	Laporan Monev implementasi Permata

Tabel 7. Komitmen Keberlanjutan Proyek Perubahan

BAB III PENUTUP

1. LESSON LEARNT

Berdasarkan hasil implementasi kegiatan Proyek Perubahan dan seluruh kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II, Lesson learnt / pembelajaran yang didapatkan oleh Project Leader dalam kepemimpinan strategis adalah sebagai berikut:

1. Support pimpinan merupakan hal yang sangat penting dalam menentukan keberlanjutan Proyek Perubahan dan lebih luas menentukan keberlanjutan perubahan pada organisasi.
2. Organisasi yang adaptif dan berkembang selalu mendorong terciptanya inovasi.
3. Implementasi proyek perubahan dapat berjalan dengan baik bila ada kolaborasi dan koordinasi dengan stakeholders internal maupun eksternal.
4. Strategi Komunikasi yang baik dengan seluruh stakeholder merupakan kunci untuk mendapatkan dukungan penuh dalam menyelesaikan implementasi proyek perubahan.
5. Penerapan strategi marketing dengan pendekatan mix 4P1C secara tepat dapat meningkatkan kinerja dan kualitas layanan pemerintah bagi masyarakat.

2. KESIMPULAN

Dari keseluruhan uraian dalam penulisan proyek perubahan ini dapat ditarik kesimpulan:

1. Isu Strategis “Belum adanya perencanaan pembangunan APBD terpadu di Lokpri KP” memberi dampak pada kondisi saat ini yaitu Rendahnya Intervensi Pembangunan di LOKPRI KP (Lokasi Prioritas Kawasan Perbatasan) dengan Sumber Dana APBD.
2. Strategi kebijakan sebagai solusi inovatif Isu Strategis adalah dengan menghadirkan “**SIPERMATA** Solusi percepatan pembangunan Lokpri KP” yaitu Sistem Perencanaan Tematik Perbatasan untuk peningkatan pembangunan Lokpri Kawasan Perbatasan dengan sumber dana APBD.
3. Penerapan SIPERMATA secara konsisten dapat meningkatkan intervensi program pembangunan perangkat daerah tematik perbatasan di Lokpri Kawasan Perbatasan yang selanjutnya berdampak pada percepatan pertumbuhan ekonomi di Lokpri Kawasan Perbatasan.

4. Keberhasilan implementasi Proyek Perubahan khususnya pada jangka pendek tidak terlepas dari partisipasi, sinergi, dan kolaborasi Stakeholders yang terlibat langsung maupun tidak langsung.
5. Penerapan strategi marketing dengan pendekatan mix 4P1C secara tepat dapat meningkatkan kinerja dan kualitas layanan pemerintah bagi masyarakat.

3. SARAN / REKOMENDASI

Saran / rekomendasi yang dapat diberikan dalam penulisan proyek perubahan ini adalah:

1. Perlu komitmen yang kuat dari perangkat daerah tematik perbatasan dalam Penerapan SIPERMATA secara konsisten agar dapat meningkatkan intervensi program pembangunan di Lokpri Kawasan Perbatasan.
2. Perlu kolaborasi dan koordinasi yang intensif dengan semua stakeholders Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/ Kota untuk mendorong percepatan Pembangunan di kawasan perbatasan.
3. BPPD NTT perlu didukung dengan penambahan staf jabatan fungsional ahli perencana untuk mendukung pelaksanaan SIPERMATA.

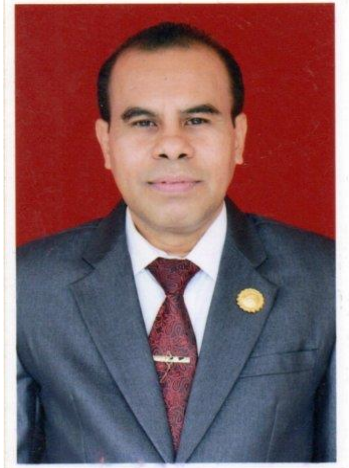
DAFTAR PUSTAKA

1. RPJPD NTT 2024-2028, Bappelitbangda Prov.NTT, 2024
2. Pergub NTT No. 101 Tahun 2023 tentang Struktur Organisasi, Tata Kelola, Tugas dan Fungsi, Biro Organisasi Prov. NTT, 2023
3. Visitasi Kepemimpinan Nasional, Modul PKN Tingkat II, LAN RI, 2023
4. Policy Brief, Modul PKN Tingkat II, LAN RI, 2023
5. Proyek Perubahan, Modul PKN Tingkat II, LAN RI, 2023
6. Energi Kepemimpinan, Modul PKN Tingkat II, LAN RI, 2021
7. Integritas Kepemimpinan, Modul PKN Tingkat II, LAN RI, 2021
8. Kepemimpinan Digital, Modul PKN Tingkat II, LAN RI, 2021
9. Kepemimpinan Kewirausahaan, Modul PKN Tingkat II, LAN RI, 2021
10. Organisasi Pembelajaran, Modul PKN Tingkat II, LAN RI, 2021
11. Isu Strategis, Modul PKN Tingkat II, LAN RI, 2021
12. Kemitraan Swasta dan Pemerintah - Public Private Partnership, Modul PKN Tingkat II, LAN RI, 2021
13. Manajemen Strategis Sektor Publik, Modul PKN Tingkat II, LAN RI, 2021
14. Marketing Sektor Publik, Modul PKN Tingkat II, LAN RI, 2021
15. Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan, Perka BNPP No. 1 Tahun 2014
16. Rencana Aksi Tahun 2025, Perka BNPP No. 3 Tahun 2023
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. KETERANGAN PERORANGAN

Nama Lengkap	:	Ir. Maksi Yaen Erich Nenabu, M.T.
NIP	:	196803261997031005
Pangkat dan Gol. Ruang	:	Pembina Utama Madya (IV/d)
Tanggal Lahir/Umur	:	26 Maret 1968 (56 Tahun)
Tempat Lahir	:	Kupang
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Agama	:	Kristen Protestan
Status Perkawinan	:	Kawin



II. RIWAYAT PENDIDIKAN

- Sekolah Dasar: SDN Oetete I Kupang Tahun 1980
- Sekolah Menengah Pertama: SMPN 2 Kupang Tahun 1983
- Sekolah Menengah Atas: SMAN 1 Kupang Tahun 1986
- Akademi: DIII Teknik Sipil Undana Kupang Tahun 1989
- S1: Sarjana Teknik Sipil di ITN Malang Tahun 1993
- S2: Pasca Sarjana Rekayasa Jalan Raya ITB Bandung Tahun 2005

III. RIWAYAT PEKERJAAN

1. Riwayat Kepangkatan, Golongan Ruang Penggajian

No.	Pangkat	Gol. Ruang	Berlaku TMT	Gaji Pokok (Rp)	Surat Keputusan		
					Pejabat	Nomor	Tanggal
1.	CPNS (80%)	III/a	01-03-1997	164.200 x 80%	MENTERI PU	KEP.002/A/W.24/97.M	07-05-1997
2.	Penata Muda	III/a	01-04-1998	266.600	MENTERI PU	KEP.002/C/W24/98.M	19-03-1998
3.	Penata Muda Tingkat I	III/b	01-04-2001	291.200	GUBERNUR NTT	823.4.1/I/526/146-ND	10-03-2011
4.	Penata	III/c	01-04-2005	1.009.200	GUBERNUR NTT	823.3/I/1/224/358-ND	09-03-2005
5.	Penata Tingkat I	III/d	01-04-2009	2.221.900	GUBERNUR NTT	823.3/I/1/193/680-ND	04-05-2009
6.	Pembina	IV/a	01-04-2013	3.174.700	GUBERNUR NTT	823.4/I/1/44/125-ND	22-02-2013

7.	Pembina Tingkat I	IV/b	01-04-2017	4.250.600	GUBERNUR NTT	823.4/I/1/1052/1052-ND	31-03-2017
8.	Pembina Utama Muda	IV/c	01-10-2020	4.949.400	KEPALA BKN	00079/KEP/AA/15001/20	09-09-2020
9.	Pembina Utama Madya	IV/d	01-10-2024	5.927.800	Plt. KEPALA BKN	00360/KEP/AA/15001/24	16-08-2024

2. Riwayat Jabatan / Pekerjaan

No	Pengalaman Bekerja	Mulai - sampai	Gol. Ruang	Tunjangan (Rp)	Surat Keputusan		
					Pejabat	Nomor	Tanggal
1.	Kasie Pengujian Jalan dan Jembatan pd. Dinas Kimpraswill Prov.NTT	2006	III/C	360.000	Gubernur NTT	Up.013.1/1/61/JS/2006	07-08-2006
2.	Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian pada Bidang Bina Marga	2009	III/C	540.000	Gubernur NTT	Up.013.1/1/30/JS/2009	16-02-2009
3.	Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan	2010	III/C	540.000	Gubernur NTT	Up.013.1/1/198/JS/2010	06-09-2010
4.	Kepala Seksi Jasa Konstruksi pada Dinas PU Prov. NTT	2013	IV/A	540.000	Gubernur NTT	Up.013.1/1/150.a/JS/2010	19-12-2013
5.	Kasie O & P pada UPT Pengelolaan SDA Wil. Sumba di Waingapu Dinas PU Prov. NTT	2014	IV/A	540.000	Gubernur NTT	BKD.013.1/1/32/PK-JS/III/2014	24-03-2014
6.	Kabid Perumahan Rakyat Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov. NTT	2016	IV/A	1.260.000	Gubernur NTT	BKD.013.1/1/1/162 /PK-JS/XII/2016	22-12-2016

7.	Kabid Bina Marga pada Dinas PUPR Prov. NTT	2019	IV/B	1.260.000	Gubernur NTT	BKD.013.1/I /88/PK-JS/II/2019	21-02-2019
8.	Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Prov. NTT	2019	IV/B		Gubernur NTT	BKD.013.1/I /74/PK-JS/II/2019	21-02-2019
9.	Kepala Dinas Pekerjaan Uum dan Perumahan Rakyat Prov. NTT	2019	IV/B	3.250.000	Gubernur NTT	BKD.013.1/I /207/ PK-JS/VII/2019	26-07-2019
10.	Kepala Dinas Pekerjaan Uum dan Perumahan Rakyat Prov. NTT	2021	IV/C	3.250.000	Gubernur NTT	816.2.1/329 /BKD.3.2	20-12-2021
11.	Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi NTT	2024	IV/D	3.250.000	Gubernur NTT	816.2.1/20/ BKD.3.2	26-03-2024

LAMPIRAN

Lampiran 1. Analisis Masalah dengan Metode USG

ISU “Lambatnya Pertumbuhan Ekonomi di Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi NTT”. Analisis Masalah dengan Metode USG terhadap 3 (tiga) alternatif masalah penyebab ISU “Lambatnya Pertumbuhan Ekonomi di Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi NTT” yaitu:

1. Belum adanya perencanaan pembangunan APBD terpadu di Lokpri KP
2. Minimnya sumber daya alam dan infrastruktur
3. Masih rendahnya intervensi APBN.

No	MASALAH	KRITERIA / SCORE			TOTAL
		U	S	G	
1.	Belum adanya perencanaan pembangunan APBD terpadu di Lokpri KP	5	5	5	15*
2.	Minimnya sumber daya alam dan infrastruktur	4	4	4	12
3	Masih rendahnya intervensi APBN	3	3	3	9

Hasil analisis masalah yang di angkat sebagai isu strategis adalah score tertinggi: **Belum adanya perencanaan pembangunan APBD terpadu di Lokpri KP.**

Lampiran 2. Rekapitulasi Anggaran Pembangunan di KP NTT (APBD Provinsi)

No.	Tahun Anggaran	Pagu Anggaran (Rp)	Alokasi KP (Rp)	Persentasi %
1.	2022	5.490.000.000.000	24.314.116.333	0,44
2.	2023	5.340.255.924.189	22.909.214.000	0,43
3.	2024	5.170.584.590.092	11.949.006.350	0,23
	TOTAL	16.000.840.514.281	59.172.336.683	0,37

Lampiran 3. Intervensi Pembangunan di KP NTT (APBD Provinsi)

No	OPD	Alokasi Anggaran di KP		
		2022	2023	2024
		Rp	Rp	Rp
1.	Dinas Perindag NTT	1.334.066.333	25.808.000	284.577.500
2.	Dinas Peternakan NTT	1.248.050.000	1.144.500.000	694.071.850
3.	Dinas PUPR NTT	-	18.902.406.000	4.550.000.000
4.	Dinas Sosial NTT	20.730.000.000	2.737.500.000	982.857.000
5.	Dinas KKP NTT	1.002.000.000	99.000.000	5.437.500.000
	TOTAL	24.314.116.333	22.909.214.000	11.949.006.350

Lampiran 4. Rekapitulasi Anggaran Pembangunan di KP NTT (APBN)

No.	Tahun Anggaran	Pagu Anggaran (Rp)	Alokasi sesuai Perka BNPP (Rp)	Persentasi %
1.	2022	305.643.116.118.500	10.514.235.932.013	3,44
2.	2023	495.253.169.329.000	7.717.285.968.789	1,56
3.	2024	257.564.319.411.000	6.554.590.733.295	2,54
	TOTAL	1.058.460.604.858.500	24.786.112.634.097	2,34

Lampiran 5. Intervensi Pembangunan di KP NTT (APBN)

No	PD/K/L	Usulan Anggaran di KP (Rp)		
		2022	2023	2024
1.	Kementrian Dagri	6.350.760.000	9.980.178.000	4.041.736.000
2.	Kementrian PUPR	1.781.740.281.593	1.999.875.028.000	969.456.195.267
3.	Kementrian Pendidikan	579.751.913.309	543.685.887.522	500.287.605.571
4.	Kementrian Kesehatan	3.043.385.909.764	422.701.868.969	241.157.561.440
5.	Kementrian Perhub	20.523.291.061	579.945.770.825	1.426.996.106.690
6.	Kementrian Kominfo	857.152.373.423	-	
7.	Kementrian ESDM	86.971.504.689	186.006.988.685	
8.	Kementrian Perdag	54.540.000.000	4.000.000.000	-
9.	Kementrian Pariwisata	38.123.351.200	2.100.000.000	17.369.591.000
10.	Kemen Perindustrian	56.132.121.400	19.486.788.000	82.436.089.000
11.	Kementrian Pertanian	120.385.929.000	757.831.667.006	71.663.517.500
12.	Kementrian PDTT	192.983.079.434	237.576.115.246	96.491.539.717
13.	Kemen Kop UMKM	15.850.000.000	30.390.451.596	6.785.317.000
14.	Kemen KKP	142.344.102.000	193.440.433.740	276.851.421.654
15.	Kemenaker	120.077.143.140	5.193.515.000	
16.	Kementrian ATR	2.900.000.000	4.184.077.000	7.018.674.000
17.	Kementrian LHK	43.742.568.000	20.314.728.000	14.818.770.000
18.	Kementrian Sosial	2.765.344.218.000	2.316.652.081.000	1.131.391.931.927
19.	Kemen Kum Ham	5.166.416.000	4.792.459.000	5.853.630.000
20.	Kemen Keuangan	3.038.890.000	5.654.673.000	4.140.591.000
21.	Kemen Han	226.547.500.000	-	150.948.017.944
22.	Kemen Lu	500.000.000	-	188.405.100
23.	BIG	18.962.035.000	13.776.681.000	17.954.402.000
24.	BN Penang Terorisme	1.244.256.000	456.785.000	798.864.000
25.	Badan Perlindungan Pekerja Migran Indo	5.104.321.000	5.256.200.000	6.591.295.000
26.	BNPP	88.721.947.000	7.421.970.000	97.508.772.000
27.	Badan Keamanan Laut	190.650.000.000	339.737.068.000	520.057.449.000
28.	Kepolisian Negara RI	45.195.845.000	5.857.298.200	35.933.472.735
29.	BNN	806.176.000	829.600.000	829.600.000
30.	BPS	-	137.656.000	154.360.000
31.	TNI			866.500.817.750
32.	Badan Karantina Indo			365.000.000
	TOTAL	10.514.235.932.013	7.717.285.968.789	6.554.590.733.295

Lampiran 6. Analisis Kebijakan Startegis dengan Metode USG

Masalah Strategis adalah “Belum Adanya Perencanaan Pembangunan APBD Terpadu Di Lokpri KP.

Kebijakan Strategis dianalisis terhadap 3 (tiga) alternatif Kebijakan Strategis yaitu:

1. Membuat SIPERMATA Lokpri KP
2. Loby Pemerintah Pusat menaikan anggaran DAK dan Dekonsentrasi
3. Menambahkan perencanaan perbatasan ke Baperida.

NO	KEBIJAKAN STARTEGIS	KRITERIA / SCORE			TOTAL
		U	S	G	
1.	Membuat SIPERMATA Lokpri KP	5	5	5	15*
2.	Loby Pemerintah Pusat menaikan anggaran DAK dan Dekonsentrasi	3	3	3	9
3.	Menambahkan perencanaan perbatasan ke Baperida	4	4	3	11

Hasil analisis Kebijakan Startegis dengan Metode USG merupakan Inovasi / Kebijakan Strategis yang dipilih adalah score tertinggi: **Membuat SIPERMATA Lokpri KP.**

Lampiran 7. Analisis Kebijakan Strategis Dengan Metode SWOT

VARIABEL STRATEGI	KEKUATAN (S)	KELEMAHAN (W)
<p>Analisis Lingkungan Internal</p> <p>Analisis Lingkungan Eksternal</p>	<ol style="list-style-type: none"> Dukungan pimpinan Badan Pengelola Perbatasan Daerah dan komitmen bersama seluruh aparatur. Kualitas aparatur yang memadai yang terdiri dari tenaga struktural dan fungsional Loyalitas aparatur untuk mencapai terwujudnya visi dan misi Pemerintah Provinsi NTT Kreativitas aparatur dalam mengembangkan tugas dan tanggungjawab Sarana prasarana serta lingkungan yang memadai Adanya Pakta Integritas anti KKN Tersedianya regulasi terkait pengelolaan perbatasan 	<ol style="list-style-type: none"> Kualitas aparatur belum memadai Belum tersedianya tenaga fungsional perencana pembangunan kawasan perbatasan Keahlian dan ilmu pengetahuan aparatur belum variatif sesuai kebutuhan tupoksi masing-masing bidang Sistem informasi perbatasan belum memadai Belum optimalnya koordinasi pembangunan kawasan perbatasan Ketersediaan data dan informasi belum akurat Belum adanya SOP baku Belum ada analisa kebutuhan kawasan perbatasan.

PELUANG (O)	STRATEGI MENGGUNAKAN KEKUATAN UNTUK MEMANFAATKAN PELUANG (SO)	STRATEGI MENGURANGI KELEMAHAN UNTUK MEMANFAATKAN PELUANG (W.O)
<ol style="list-style-type: none"> Dukungan Kepala Daerah dan DPRD Provinsi NTT terhadap Badan Pengelola Perbatasan Daerah dalam pengkoordinasian pembangunan kawasan perbatasan Kebijakan Otonomi Daerah Kesempatan dan peluang kerjasama lintas OPD Pemprov Perkembangan teknologi dan informasi di era Revolusi Industri 4.0 yang dapat meningkatkan kinerja aparatur dan transformasi organisasi Tuntutan masyarakat terhadap perencanaan pembangunan kawasan transparan, akuntabel. 	<ol style="list-style-type: none"> Mewujudkan penyusunan Perencanaan Tematik Perbatasan Pembangunan Kawasan Perbatasan yang berkualitas melalui SIPERMATA Mewujudkan dukungan kerjasama dengan lintas OPD Pemprov dalam bentuk Kesepahaman bersama SIPERMATA Meningkatkan monitoring dan evaluasi SIPERMATA dalam pembangunan kawasan perbatasan Memanfaatkan penggunaan teknologi dan informasi dalam koordinasi pembangunan kawasan perbatasan Sosialisasi SIPERMATA kepada pihak internal dan external 	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan koordinasi pembangunan kawasan perbatasan Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparat pengelola perbatasan Meningkatkan ketersediaan data dan informasi yang akurat berbasis digital

ANCAMAN (T)	STRATEGI MENGGUNAKAN KEKUATAN UNTUK MENCEGAH/MENGATASI ANCAMAN (S.T.)	STRATEGI MENGURANGI KELEMAHAN UNTUK MENCEGAH/MENGATASI ANCAMAN (W.T.)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya perubahan regulasi yang dinamis tidak diperhitungkan sebelumnya 2. Tumpang tindih kebijakan dari pemerintah pusat dan provinsi 3. Adanya ego sektor dalam pembangunan kawasan perbatasan 4. Kemampuan pembiayaan pemerintah provinsi yang belum memadai 5. Fungsi koordinasi yang belum berjalan efektif oleh Badan Pengelola Perbatasan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pembangunan kawasan perbatasan antara pusat, provinsi dan kabupaten perbatasan 2. Mendorong implementasi SIPERMATA melalui sosialisasi berkesinambungan agar terwujud peningkatan intervensi PERMATA di Kawasan Perbatasan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas perencanaan Pembangunan Kawasan perbatasan 2. Membangun sistem informasi Kawasan perbatasan.

**Lampiran 8. Rekapitulasi Usulan Anggaran Program/Kegiatan T.A. 2026
APBDP pada Kawasan Perbatasan**

**REKAPITULASI USULAN ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN T.A. 2026 APBDP
PADA KAWASAN PERBATASAN**

No	Sektor	Jumlah (Rp.)
1	Disperindag	35,504,192,500
2	Energi	4,000,000
3	Informatika dan Komunikasi	60,980,000,000
4	Kesehatan	94,589,250,000
5	Lingkungan Hidup	54,219,000,000
6	Pariwisata	35,346,250,000
7	Pendidikan	64,225,450,000
8	Perhubungan	69,207,000,000
9	Perikanan	27,653,615,500
10	Pertanian	47,481,700,000
11	Peternakan	33,213,000,000
12	PUPR	310,495,500,000
13	UMKM	-
	TOTAL	832,918,958,000

Lampiran 9. Arti Lambang “SIPERMATA”



1. Lima Orang warna warni dalam posisi bergandengan tangan melambangkan semangat Pancasila dari berbagai unsur berkolaborasi untuk membangun Kawasan Perbatasan.
2. Bulan Sabit Biru melambangkan kebangkitan Masyarakat Kawasan Perbatasan sebagai kekuatan yang membawa energi harapan menuju mandiri dan sejahtera.

Lampiran 10. Evidence Implementasi SIPERMATA

<https://drive.google.com/drive/folders/1ILgVZ8jvcmk7xvkypXHliw6HaWqpMhyM?usp=sharing>